

**ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN TES WAWASAN
KEBANGSAAN PEGAWAI KPK DI TEMPO.CO**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara Medan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)**

Oleh:

**MAHMUDI
NIM 0105173224**

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI



**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

**ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN TES WAWASAN
KEBANGSAAN PEGAWAI KPK DI TEMPO.CO**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara Medan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

SKRIPSI

Oleh

MAHMUDI
NIM 0105173224

Program Studi Ilmu Komunikasi



Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Abdul Rasyid, MA
NIP. 19630609 201411 2 001

Dr. Muhammad Alfikri, S.Sos. M.Si
NIP. 19830323 201001 1 026

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

2021

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
UIN Sumatera Utara Medan
Di Medan

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mahmudi
NIM : 0105173224
Judul Skripsi : ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN TES
WAWASAN KEBANGSAAN PEGAWAI KPK DI
TEMPO.CO

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami harap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera di Munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pembimbing I

Medan, 13 Agustus 2021

Pembimbing II

Dr. Abdul Rasyid, MA
NIP. 19630609 201411 2 001

Dr. Muhammad Alfikri, S.Sos. M.Si
NIP. 19830323 201001 1 026

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Analisis Framing Pemberitaan Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK di Tempo.co**” an. Mahmudi, Nim. 0105173224 Program Studi Ilmu Komunikasi telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara Medan pada tanggal 18 Agustus 2021.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) pada Program Studi Ilmu Komunikasi.

Medan, 12 Juni 2022

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Muhammad Alfikri, S.Sos, M.Si
NIDN. 2023038301

Dr. Solihah Titin Sumanti, M.A
NIDN. 2013067301

Penguji

1. Dr. Fakhrrur Rozi, M.I.Kom
NIDN. 2018118303

2. Dr. Anang Anas Azhar, M.Ag
NIDN. 0104107401

3. Dr. Abdul Rasyid, MA
NIDN. 2002046401

4. Dr. Muhammad Alfikri, S.Sos. M. Si
NIDN. 2023038301

Mengetahui,
DEKAN FIS UIN SU

Dr. Maraimbang, M.A
NIDN. 2029066903

MOTTO

“Lakukan yang terbaik untuk jadi yang terbaik.”

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahmudi
NIM : 0105173224
Tempat/Tgl. Lahir : Langsa, 17 Januari 1999
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara
Alamat : Jl. MT. Haryono Perum Lestari Indah No 25 B

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Framing Pemberitaan Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Di Tempo.co”, adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 13 Agustus 2021
Yang membuat pernyataan

Mahmudi
NIM. 0105173224

ABSTRAK

Mahmudi, 2021, *Analisis Framing Pemberitaan Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Di Tempo.co.*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Penelitian ini berjudul *Analisis Framing Pemberitaan Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Di Tempo.co.* Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pembedaan Tempo.co terhadap polemik TWK pegawai KPK. Teori yang digunakan adalah Konstruksi Realitas Sosial, Teori Shoemaker dan Reese, dan *Analisis Framing*. Objek yang diteliti adalah lima berita yang terbit di situs www tempo.co dalam periode 11 Mei hingga 26 Mei 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan paradigma konstruktivisme. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Hasil penelitian menunjukkan Sintaksis tiga dari lima berita yang terbit bertentangan dengan terhadap hasil TWK. Skrip berita sudah memenuhi unsur 5W+1H dan cenderung menonjolkan unsur *why*. Tematik banyak menggunakan Koherensi Kronologis untuk menjelaskan urutan peristiwa. Retoris empat dari lima berita menggunakan foto yang tanggal diambilnya tidak sesuai dengan tanggal liputan atau pernyataan yang disampaikan narasumber dalam berita.

Kata kunci :

Framing, KPK, Tempo.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *robbil 'alamin*, tiada untaian kata dan lisan seorang insan melainkan kata puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Tak lupa selawat beriring salam, tak bosannya penulis hadiahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam yang telah berjuang membawa agama Islam untuk menyelamatkan Ummat menuju jalan kebaikan yang diridhoi Allah. Semoga kita semua bisa meneladani sifat Rasulullah dan mendapatkan syafaatnya kelak di Yaumul Mahsyar, Aamiin.

Sebagai Ummat Rasulullah yang berusaha meneladani sifat Beliau, kita diminta untuk selalu menuntut ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Penulis telah melalui jenjang perkuliahan selama empat tahun dan untuk di semester terakhir berusaha memenuhi tugas akhir berupa penulisan skripsi yang berjudul "ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN TES WAWASAN KEBANGSAAN PEGAWAI KPK DI TEMPO.CO".

Selama proses pengerjaan skripsi, penulis telah berusaha semaksimal mungkin agar skripsi ini dapat selesai dengan baik dan tepat waktu. Namun penulis menyadari bahwa tentu masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa yang terdapat dalam skripsi ini, hal tersebut disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini mampu memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan dapat berguna serta bermanfaat bagi para pembacanya.

Skripsi yang telah berhasil penulis rampungkan ini tentu bukanlah pencapaian murni dari diri penulis sendiri, melainkan ada bantuan, dukungan, serta banyaknya doa dari orang-orang yang dengan tulis mencurahkan untuk

penulis. Untuk itu penulis juga dengan sepenuh hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, M.A selaku Rektor UIN Sumatera Utara.
2. Bapak Drs. Maraimbang Daulay, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Alfikri, S.Sos. M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan serta sebagai pembimbing II yang telah begitu banyak membantu penulis dengan memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Ibu Dr. Solihah Titin Sumanti, MA, selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.
5. Bapak Dr. Abdul Rasyid, MA, selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang dengan sabar memberikan banyak bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen serta staf pegawai Fakultas Ilmu Sosial Sumatera Utara Medan yang telah memberikan pelayanan, bantuan, bimbingan maupun mendidik penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Media Tempo.co yang telah menyajikan berita secara aktual dan faktual sehingga dapat dijadikan objek penelitian oleh penulis.
8. Teristimewa penulis sampaikan terima kasih yang teramat sangat kepada orang tua penulis yang begitu luar biasa yaitu papa Maimun, SE.Ak dan mama tercinta Khairani, turut serta ayah H. Abdul Muluk Siregar, BSc, SE. Karena telah begitu banyak memberikan limpahan kasih sayang dan doa yang sangat tulus untuk penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan jenjang pendidikan dan skripsi ini. Semoga Allah selalu merahmati ketiganya, Amin.
9. Teristimewa juga penulis sampaikan kepada adikku, Zahratusafara yang saat ini juga sedang menempuh perkuliahan.

10. Senior yang sebenarnya sebaya, Suci Ayu Pratiwi sudah menjadi tempat berkeluh kesah dan juga Intan Zhorifah yang selalu ringan tangan memberikan bantuan. Semoga Allah membalas kebaikan kalian.
11. Seluruh kru dan alumni LPM Dinamika UIN Sumatera Utara sebagai tempat belajar kedua setelah perkuliahan.
12. Seluruh relawan Kejar Mimpi Medan yang banyak memberikan energi positif dan pengalaman yang berkesan dalam melakukan kegiatan sosial.
13. Seluruh teman-teman penyintas tugas akhir duniawi Alfian, Alam, Alwi, Zul, Imran, Iqbal, Bayu, Mumtaz, July, Silvi, Puput, Amy, Fitri dan Sadiyah. Semoga kesehatan mental kalian tetap terjaga selama menyelesaikan skripsi.
14. Kepada Netflix, warnet E-Sport, dan cafe dengan harga borjuis sebagai tempat penulis melepas penat dan mencari hiburan.

Medan, 13 Agustus 2021

Peneliti

Mahmudi

NIM. 0105173224

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Teori Konstruksi Sosial Media Massa	9
B. Komunikasi Massa	13
C. Teori Shoemaker dan Reese.....	15
D. Berita.....	17
E. Paradigma Konstruktivisme	19
F. Framing	21

G.	Framing Model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.....	22
H.	Penelitian Terdahulu	23
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	25
A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	25
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	25
C.	Pemilihan Obyek Penelitian.....	26
D.	Tahapan Penelitian	26
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	26
F.	Teknik Analisis Data.....	27
G.	Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	29
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	30
A.	Profil Tempo.co	30
B.	Deskripsi Hasil Penelitian	31
C.	Hasil Pembingkaiian Berita.....	72
BAB V	PENUTUP	78
A.	Kesimpulan	78
B.	Saran.....	78
	DAFTAR PUSTAKA.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan. www.kpk.go.id (diakses pada 2 Juni 2021).

Dilihat dari perjalanannya dalam memberantas korupsi di tanah air sejak awal dibentuk pada tahun 2002, KPK pernah menjadi lembaga kuat yang ditakuti politisi. Tidak heran banyak usaha pelemahan yang dilakukan baik dari aturan maupun serangan langsung ke pegawainya. Beberapa kasus yang sempat membelit KPK diantaranya Cicak vs Buaya, kriminalisasi pimpinan KPK, kekerasan terhadap Novel Baswedan, revisi UU KPK dan masih banyak lagi.

Belakangan, KPK tengah menjadi sorotan setelah 75 pegawai termasuk penyidik senior dinyatakan tidak lulus asesmen tes wawasan kebangsaan untuk alih status menjadi aparatur sipil negara. Sejumlah sumber Tempo di komisi antirasuah membeberkan, upaya menjegal karier para penyidik sudah dimulai sejak awal seleksi, yakni adanya daftar pertanyaan yang janggal. Dalam tes tersebut, muncul berbagai pertanyaan aneh, seperti soal lepas jilbab, mengucapkan hari raya kepada umat beragama lain, hukuman mati bagi penista agama, LGBT, kebijakan pemerintah yang tidak disetujui, hingga soal doa qunut.

Tentunya hasil asesmen TWK pegawai KPK turut menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Beragam tanggapan muncul usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan 51 pegawainya dari total 75 orang yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN), masuk ke dalam daftar merah alias tidak bisa dibina lagi.

Dasar bagi kalangan yang pro terhadap TWK menyatakan pelaksanaan tes merupakan program yang sesuai dengan amanat UU Nomor 19 Tahun 2019, jadi tidak melanggar HAM sebagaimana yang dilaporkan para pegawai. Tes ini dilakukan untuk membersihkan KPK dari individu yang memiliki pikiran radikal, tidak nasionalis, dan terlibat organisasi terlarang. Pimpinan KPK juga sebenarnya berharap seluruh pegawai bisa lulus.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga angkat bicara. TWK tidak hanya dilakukan oleh KPK dalam proses peralihan pegawai menjadi ASN, tapi juga di lembaga lainnya. Ada juga di antara mereka yang gagal lolos penilaian TWK seperti yang dialami 75 pegawai KPK, jadi hal ini tidak perlu diributkan. Bagi pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan, tuturnya, masih bisa mengikuti pendidikan kedinasan. www.tempo.co (diakses 3 Juni 2021).

Sementara itu, pihak yang kontra mengatakan bahwa TWK merupakan hasil selundupan oknum pimpinan karena sebelumnya tidak ada dibahas dalam rapat. Salah satu tanggapan juga datang dari Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menyatakan, pemecatan 51 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) merupakan pelanggaran konstitusi. Menurut Feri, adanya TWK sejak awal adalah tes yang tidak sah atau ilegal. Karena di PP 41/2020 tentang alih status pegawai KPK, terdapat ketentuan lima tahapan alih status, dalam lima tahapan itu tidak terdapat TWK.

Atas kericuhan yang terjadi, Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan resmi mengenai tes tersebut. Jokowi menegaskan bahwa hasil TWK tidak dapat menjadi dasar pemberhentian 75 orang pegawai KPK.

Menurut Presiden, TWK ini dibuat sebagai salah satu syarat peralihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Peralihan status ini adalah bentuk upaya pemberantasan korupsi yang lebih sistematis. Namun ia menegaskan TWK tak bisa dijadikan dasar penilaian begitu saja. Ia pun mengatakan sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua UU KPK, yang menyatakan bahwa proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN tak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN. www.tempo.co (diakses pada 2 Juni 2021).

Terkait kejadian itu, banyak media cetak dan daring ikut memberitakan kontroversi asesmen tes wawasan kebangsaan pegawai KPK. Hal ini menunjukkan peran media massa sebagai sarana atau alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Media memiliki fungsi kontrol sosial dalam mengawal setiap kebijakan yang dilaksanakan oleh pemilik kebijakan dan/atau penyelenggara negara. Media memiliki wewenang untuk mengetahui kebijakan yang dibuat oleh suatu pihak. Tidak hanya berperan dalam kontrol sosial, media juga berperan sebagai *watchdog* (memberikan evaluasi, kritik, dan saran) bagi parlemen, otoritas, lembaga peradilan atau penegak hukum dan masyarakat

Media massa melibatkan seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk aspek sosial, budaya, politik, hingga ekonomi. Seiring berjalannya waktu di era yang menuntut serba cepat ini, kebutuhan akan media massa semakin meningkat. Berita memegang peranan yang penting bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan informasi baik yang terjadi di dalam maupun luar negeri. Melalui berita, kita dapat tetap terhubung dengan berbagai peristiwa yang terjadi di penjuru dunia.

Untuk menarik perhatian pembaca, berita harus dikemas dengan bahasa serta kalimat yang dapat menimbulkan rasa ingin tahu. Publik cenderung mempercayai apa yang ditulis media karena beranggapan berita tersebut ditulis sesuai fakta yang terjadi di lapangan. Pekerjaan media pada dasarnya ialah mengkonstruksikan realitas. “Disebabkan sifat dan faktanya bahwa pekerjaan media massa adalah menceritakan peristiwa-peristiwa, maka seluruh isi berita merupakan realitas yang dikonstruksikan. Pembuatan berita di media massa sebenarnya tidak lebih dari penyusunan realitas-realitas hingga membentuk sebuah ‘cerita’,” (Sobur, 2002, p. 88).

Media massa meliputi media cetak seperti koran, tabloid, majalah, dan media elektronik seperti radio, televisi dan internet. Menurut Usman (2009), salah satu peran media massa adalah sebagai institusi kunci dalam masyarakat perihal penyampaian informasi. Media massa mampu memengaruhi budaya, kebiasaan dan politik. Sebaliknya, media massa terpengaruh dengan perubahan kepercayaan, minat, selera, dan perilaku kita. Hal ini menjelaskan bahwa media juga melihat apa yang disukai oleh target konsumennya. Ketika suatu berita menarik perhatian masyarakat, maka hal itu akan memengaruhi cara media menyajikan berita tersebut.

Sebagai kekuatan keempat dalam sebuah tatanan negara atau disebut *fourth estate*, media memiliki fungsi sebagai alat untuk menyalurkan pesan baik berita maupun informasi tentang berbagai hal. Media juga mampu menciptakan pendapat umum dari publik dalam menanggapi sebuah peristiwa. Namun, “menuliskan berita secara netral dan berimbang adalah hal yang mustahil bagi media. Sebab, akan selalu ada kepentingan-kepentingan baik dari media, pemilik media, dan wartawan. Hal itu dapat diketahui dari narasumber berita, isu-isu yang diberitakan, posisi berita di surat kabar, dan sebagainya” (Sobur, 2009, p. 40).

Menurut Stephen D. Reese dan Pamela J. Shoemaker, setiap berita yang dipublikasikan oleh media telah didesain sesuai “kepentingan” media baik secara internal maupun eksternal. Dengan demikian, teks media sangat dipengaruhi oleh

pekerja media secara individu, rutinitas media, organisasi media, institusi di luar media, dan ideologi.

Dalam pemberitaannya, media memang dituntut menghasilkan berita yang real, yaitu fakta yang benar-benar terjadi di lapangan. Tetapi perlu dicatat bahwa media tidak pernah bisa membuat berita yang netral atau objektif. Sebab, ada kepentingan lain, seperti kepentingan media, pemilik media, atau wartawan itu sendiri, yang terdapat dalam pemberitaan media massa.

Apabila berita yang disampaikan tidak sesuai fakta, maka hal tersebut merupakan berita bohong. Oleh sebab itu, Islam mengajarkan kita untuk *tabayyun* dalam menerima informasi, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ
نُدِمِينَ

Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. (Q.S. Al-Hujurat: 6).

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda:

وَيَلِّ لِلَّذِي يُحَدِّثُ الْقَوْمَ ثُمَّ يَكْذِبُ لِيُضْحِكَهُمْ وَيَلِّ لَهُ وَيَلِّ لَهُ

Sungguh celaka orang yang berbicara kepada suatu kaum kemudian ia berbohong untuk membuat mereka tertawa, sungguh celaka ia, sungguh celaka ia. (H.R. Ahmad dalam Musnad-nya).

Alasan peneliti memilih media Tempo untuk dianalisis karena media tersebut cukup intens memberitakan persoalan asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) bagi pegawai KPK. Sebanyak 259 berita telah terbit pada bulan Mei 2021 dan 118 berita pada Juni 2021 di situsny. Selain itu, pemberitaan yang muncul di

Tempo, baik di majalah, surat kabar maupun di situsnya, tidak segan-segan mengkritisi pemerintah, tokoh publik, atau lembaga tertentu.

Seperti kebanyakan media, Tempo.co juga memiliki perspektifnya sendiri dalam menyajikan berita. Salah satunya adalah berita mengenai asesmen tes wawasan kebangsaan pegawai KPK. Dalam studi ilmu komunikasi, cara media memandang isu, menekankan fakta untuk kemudian mengemasnya menjadi berita dikenal dengan *framing*.

“Framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita,” (Sobur, 2009, p. 162). Secara konsep, media *framing* menjelaskan bahwa proses mendistorsi atau mereduksi sebuah fakta rumit dan bertingkat-tingkat dilakukan dengan memfokuskan dan meneliti aspek tertentu dari fakta tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis *framing* yang dikembangkan oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Model analisis *framing* ini menyebutkan bahwa terdapat dua konsepsi *framing* yang saling berkaitan. Pertama, dalam konsepsi sosiologis yaitu bagaimana seseorang mengartikan suatu peristiwa melalui perspektif tertentu. Kedua, dalam konsepsi psikologis yaitu bagaimana individu mengolah sejumlah informasi yang ia peroleh dan memprosesnya ke dalam skema tertentu. Empat perangkat yang dimiliki model ini untuk menganalisis sebuah berita secara mendalam menjadi alasan peneliti memilih model ini. Berita dapat dianalisis lebih dalam melalui perangkat sintaksis, skrip, tematik, dan retorik.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pembingkaihan yang dilakukan Tempo.co terhadap pemberitaan asesmen tes wawasan kebangsaan pegawai KPK. Dalam penelitian ini, peneliti memilih jangka waktu penerbitan Tempo.co selama dua pekan, terhitung dari edisi 11 Mei hingga 26 Mei 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah: Bagaimanakah framing berita Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK pada Tempo.co dalam dimensi sintaksis, skrip, tematik, dan retorik?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui framing berita Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK pada Tempo.co dalam dimensi sintaksis, skrip, tematik, dan retorik.

D. Manfaat Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memperluas kajian komunikasi dan menambah wawasan pengetahuan serta menambah pengalaman mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara dalam mempelajari pbingkaiian pemberitaan di media.
2. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap peneliti dan pembaca khususnya dalam kajian *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Penelitian ini juga diharapkan dapat membuka wawasan tentang pbingkaiian berita Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Di Tempo.co.
3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi pihak yang ingin melakukan penelitian serupa. Melalui penelitian ini, peneliti juga bisa semakin peka terhadap konstruksi berita yang dilakukan media.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan suatu penelitian yang konsisten dan sistematis, maka perlu dibuat penjelasan tentang sistematika pembahasan sebagai gambaran umum rencana susunan bab demi bab dalam skripsi ini. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini mencakup lima bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. BAB II Kajian Teori terdiri dari teori yang digunakan dan penelitian terdahulu. BAB III Metodologi Penelitian menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian ini, lokasi dan waktu penelitian, pemilihan objek penelitian, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik pemeriksaan keabsahan data. BAB IV Hasil dan Pembahasan terhadap berita yang dianalisis. BAB V Penutup berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Konstruksi Sosial Media Massa

Pada awalnya, gagasan teori konstruksi sosial media massa (*social construction of mass media*) menjadi populer sejak diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman pada tahun 1966 dalam bukunya *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociological of Knowledge*. Mereka menyatakan bahwa pada dasarnya realitas sosial tidak dibentuk secara alamiah, melainkan dikonstruksi oleh manusia. Beberapa hal yang menjadi asumsi dasar (dalam Bungin, 2008, p. 189) yaitu:

1. Realitas merupakan hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunia sosial di sekelilingnya;
2. Hubungan antara pemikiran manusia dan konteks sosial tempat pemikiran itu timbul, bersifat berkembang dan dilembagakan;
3. Kehidupan masyarakat itu dikonstruksi secara terus menerus;
4. Membedakan antara realitas dengan pengetahuan. Realitas diartikan sebagai kualitas yang terdapat di dalam kenyataan yang diakui sebagai memiliki keberadaan (*being*) yang tidak bergantung kepada kehendak kita sendiri. Sementara pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata (*real*) dan memiliki karakteristik yang spesifik.

Berger dan Luckman menyebutkan bahwa realitas diterjemahkan sebagai kualitas yang terdapat di dalam realitas-realitas yang diakui memiliki keberadaan (*being*) yang tidak tergantung kepada kehendak kita sendiri. Mereka menyampaikan terjadi dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu (Bungin, 2008: p. 191). Berger menyebut proses dialektis ini sebagai momen dan membaginya ke dalam tiga tahap, "diantaranya:

1. Eksternalisasi, yakni proses penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia. Dimulai dari interaksi antara pesan iklan dengan individu pemirsa melalui tayangan televisi. Tahap pertama ini merupakan bagian yang penting dan mendasar dalam satu pola interaksi antara individu dengan produk-produk sosial masyarakatnya. Yang dimaksud dalam proses ini ialah ketika suatu produk sosial telah menjadi sebuah bagian penting dalam masyarakat yang setiap saat dibutuhkan oleh individu, maka produk sosial itu menjadi bagian penting dalam kehidupan seseorang untuk melihat dunia luar.
2. Objektivasi ialah tahap di mana interaksi sosial yang terjadi dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi. Pada tahap ini, sebuah produk sosial berada proses institusionalisasi, sedangkan individu memanifestasikan diri dalam produk-produk kegiatan manusia yang tersedia, baik bagi produsen-produsennya maupun bagi orang lain sebagai unsur dari dunia bersama. Objektivasi ini bertahan lama sampai melampaui batas tatap muka di mana mereka bisa dipahami secara langsung. Dengan demikian, individu melakukan objektivasi terhadap produk sosial, baik penciptanya maupun individu lain. Kondisi ini berlangsung tanpa harus mereka saling bertemu. Artinya, proses ini bisa terjadi melalui penyebaran opini sebuah produk sosial yang berkembang di masyarakat melalui diskursus opini masyarakat tentang produk sosial, dan tanpa harus terjadi tatap muka antarindividu dan pencipta produk sosial.
3. Internalisasi ialah proses di mana individu mengidentifikasi dirinya dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya. Terdapat dua pemahaman dasar dari proses internalisasi secara umum; pertama, bagi pemahaman mengenai 'sesama saya' yaitu pemahaman mengenai individu dan orang lain; kedua, pemahaman mengenai dunia sebagai sesuatu yang maknawi dari kenyataan sosial.

Esensi teori konstruksi sosial media massa terletak pada sirkulasi informasi yang cepat dan luas sehingga konstruksi berlangsung dengan sangat cepat dan sebarannya merata. Konstruksi sosial media massa diposisikan untuk melengkapi konstruksi atas realitas, dan memperbaiki esensi kelemahan dengan cara menempatkan seluruh kelebihan dan efek media massa. Beberapa tahapan-tahapan dalam proses konstruksi sosial media massa, sebagai berikut:

1. Tahap menyiapkan materi konstruksi yang mencakup kepada beberapa hal yaitu;
 - a. Keberpihakan media massa kepada kapitalisme seperti yang terjadi saat ini hampir semua media mainstream dimiliki kelompok kapitalis tertentu untuk menjadikan media massa sebagai mesin penciptaan uang dan penggandaan modal. Tentunya hal itu memunculkan ideologi yang lebih mengutamakan bagaimana agar media massa mampu mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya bagi pemilik dan pemodal.
 - b. Keberpihakan semua kepada masyarakat. Bentuk dari keberpihakan ini adalah empati, simpati, dan berbagai partisipasi kepada masyarakat, namun ujung-ujungnya adalah untuk menjual berita dan menaikkan rating untuk kepentingan kapitalis. Apalagi saat ini jelas bahwa hampir seluruh media *mainstream* dimiliki kelompok usaha tertentu dan berafiliasi kepada partai politik tertentu.
 - c. Keberpihakan kepada kepentingan umum. Bentuk keberpihakan kepada kepentingan umum dalam arti sesungguhnya sebenarnya adalah visi setiap media massa namun fakta di lapangan hanyalah sebatas jargon dan slogan saja.
2. Tahap sebaran konstruksi yakni dilakukan masing-masing media massa dengan strategi yang berbeda namun prinsip utamanya adalah real-time. Media elektronik memiliki konsep real-time yang berbeda dengan media cetak. Karena sifatnya yang langsung (live), maka yang dimaksud dengan real-time oleh media elektronik adalah seketika disiarkan, seketika itu juga pemberitaan sampai ke pemirsa atau pendengar. Namun bagi varian-varian

media cetak, yang dimaksud dengan real-time terdiri dari beberapa konsep hari, minggu, atau bulan, seperti harian, mingguan, dan bulanan. Walaupun media cetak memiliki konsep real-time yang tertunda, namun konsep aktualitas menjadi pertimbangan utama sehingga pembaca merasa tepat waktu memperoleh berita tersebut.

3. Tahap pembentukan konstruksi yang terdiri dari berbagai 2 tahap, yakni:
 - a. Pembentukan konstruksi realitas membenaran sebagai suatu bentuk konstruksi media massa yang terbentuk di masyarakat yang cenderung membenarkan apa saja yang ada (tersaji) di media massa sebagai suatu realitas kebenaran. Selain itu, kesediaan dikonstruksi oleh media massa, yaitu sikap generik dari tahap pertama. Bahwa pilihan orang untuk menjadi pembaca dan pemirsa media massa adalah karena pilihannya untuk bersedia pikiran-pikirannya dikonstruksi oleh media massa. Selain itu menjadikan konsumsi media massa sebagai pilihan konsumtif, di mana seseorang secara *habit* tergantung pada media massa. Media massa adalah bagian kebiasaan hidup yang tak bisa dilepaskan.
 - b. Pembentukan konstruksi citra yakni bagaimana konstruksi citra pada sebuah pemberitaan ataupun bagaimana konstruksi citra pada sebuah iklan. Konstruksi citra pada sebuah pemberitaan biasanya disiapkan oleh orang-orang yang bertugas di dalam redaksi media massa, mulai dari wartawan, editor, dan pimpinan redaksi. Sedangkan konstruksi citra pada sebuah iklan biasanya disiapkan oleh para pembuat iklan, misalnya copywriter. Pembentukan konstruksi citra ialah bangunan yang diinginkan oleh tahap-tahap konstruksi. Di mana bangunan konstruksi citra yang dibangun oleh media massa ini terbentuk dalam dua model, yakni model *good news* dan model *bad news*. Model *good news* adalah sebuah konstruksi yang cenderung mengkonstruksi suatu pemberitaan sebagai pemberitaan yang baik. Sedangkan model *bad news* adalah

sebuah konstruksi yang cenderung mengkonstruksi kejelekan atau memberi citra buruk pada objek pemberitaan.

4. Tahap konfirmasi yakni tahapan dimana media massa maupun pembaca dan pemirsa memberi argumentasi dan akuntabilitas terhadap pilihannya untuk terlibat dalam tahap pembentukan konstruksi. Bagi media, tahapan ini perlu sebagai bagian untuk memberi argumentasi terhadap alasan-alasannya konstruksi sosial. Sedangkan bagi pemirsa dan pembaca, tahapan ini juga sebagai bagian untuk menjelaskan mengapa ia terlibat dan bersedia hadir dalam proses konstruksi sosial.

B. Komunikasi Massa

Komunikasi massa adalah studi ilmiah tentang media massa beserta pesan yang dihasilkan, pembaca/pendengar/penonton yang akan coba diraihinya, dan efeknya terhadap mereka. Menurut Cangara (2002), media massa meliputi surat kabar, televisi, hingga radio merupakan suatu alat yang digunakan dalam menyampaikan pesan menggunakan alat komunikasi mekanis dari sumber pesan ke penerima pesan atau khalayak umum. Media massa juga merupakan kekuatan alat kontrol sosial dalam masyarakat yang digunakan sebagai pengganti kekuatan dan sumber daya yang lain.

Media massa adalah alat atau sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui jaringan tertentu. Media massa menyentuh semua aspek kehidupan manusia, termasuk aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya. Dengan berkembangnya informasi saat ini, membuat media massa semakin dibutuhkan dalam menyampaikan berita. Berita menjadi sangat penting bagi masyarakat, karena media massa menyajikan berbagai peristiwa seputar kehidupan masyarakat di dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, melalui berita, orang dapat mengetahui apa saja informasi yang sedang berkembang di seluruh belahan dunia.

Komunikasi massa merupakan disiplin kajian ilmu sosial yang relatif muda jika dibandingkan dengan ilmu psikologi, sosiologi, ilmu politik, dan ekonomi. Sekarang ini komunikasi massa sudah dimasukkan dalam disiplin ilmiah. (Nurudin, 2013, p. 27).

Gebner mendefinisikan komunikasi massa adalah menghasilkan suatu produk berupa pesan-pesan komunikasi. Produk tersebut disebar, didistribusikan kepada khalayak luas secara terus menerus dalam jarak waktu yang tetap, misalnya harian, mingguan, dwimingguan, atau bulanan. (Romli, 2016, p. 2).

Fungsi komunikasi massa merupakan untuk menyebarluaskan informasi, meratakan pendidikan, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan kegembiraan dalam hidup seseorang. Akan tetapi, dengan perkembangan teknologi komunikasi yang begitu cepat terutama dalam bidang penyiaran dan media pandang dengar (audiovisual), menyebabkan media massa telah memiliki banyak perubahan. (Cangara, 2012, p. 69).

Ada beberapa efek komunikasi massa yaitu: sebagai fisik, pertama efek ekonomis, ialah komunikasi massa menggerakkan usaha dalam berbagai sektor, seperti produksi, distribusi dan konsumsi jasa media massa. Kedua efek sosial, ialah komunikasi massa akan membawa perubahan pada struktur atau interaksi sosial. Ketiga efek penjadwalan kembali kegiatan sehari-hari, ialah sebelum ada TV orang biasanya pergi tidur malam sekitar pukul 8 dan bangun pagi sekali karena harus berangkat kerja di tempat yang jauh (Roudhonah, 2019, p. 178-179).

Selain memiliki dampak di bagian efek fisik media massa juga memiliki efek dalam penyampaian pesan. Pertama efek kognitif, dimana seseorang bila sering menonton, membaca media massa maka memberikan pengetahuan, keterampilan maupun kepercayaan. (Roudhonah, 2019, p. 179). Kedua efek afektif, yaitu apa yang disebar melalui media massa dapat mengubah pada apa yang dirasakan, disenangi atau dibenci khalayak. (Roudhonah, 2019, p. 180). Ketiga efek konatif, yaitu dampak pesan media massa dapat menimbulkan pola-pola tindakan, kegiatan atau perilaku nyata yang dapat diamati. (Roudhonah, 2019, p. 181).

C. Teori Shoemaker dan Reese

Teori yang dikemukakan Reese dan Shoemaker dalam bukunya *Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media Content* (1996, p. 64), dijelaskan bahwa informasi yang disampaikan media kepada publik tidak datang dari “ruang hampa” yang netral. Melainkan telah dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal media itu sendiri. Faktor internal berhubungan dengan kepentingan pemilik media, reporter, dan rutinitas media. Sedangkan faktor eksternal berhubungan dengan pengiklan, kebijakan pemerintah, masyarakat dan lainnya. Agar lebih jelas, Reese dan Shoemaker membagi faktor-faktor yang mempengaruhi isi media massa menjadi lima level, yaitu:

1. *Individual Level*

Faktor individu menjadi level pertama dalam menentukan isi berita. Karakteristik individu seperti latar belakang dan pengalaman dapat mempengaruhi sikap maupun perilaku personal dan profesional reporter dalam memahami realitas.

2. *Media Routines Level*

Yang dimaksud rutinitas media berarti suatu bentuk yang sudah diulang-ulang, terpola dalam mengemas berita. Rutinitas media dibentuk oleh tiga unsur yang saling berkaitan. Pertama, sumber berita yaitu sumber yang didapatkan media untuk pemberitaannya. Misalnya lembaga pemerintah, partai politik dan sebagainya. Kedua, organisasi media yaitu redaksi yang sebagai *gatekeeper* dalam menyeleksi berita sebelum diterbitkan. Ketiga, khalayak yaitu penonton, pendengar, atau pembaca berita.

3. *Organization Level*

Level ini berkaitan dengan struktur organisasi, kebijakan dan tujuan media. Level ini menurut Reese dan Shoemaker lebih berpengaruh, karena pemilik media memegang kebijakan dalam menentukan pemberitaan. Tujuan media tentunya berkaitan dengan keuntungan. Faktor ekonomi inilah yang menyebabkan media

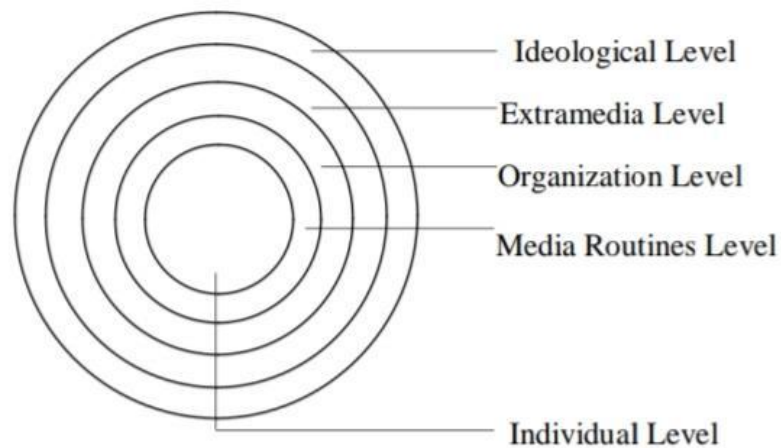
jarang mengkritik pihak yang memberikan keuntungan, misalnya pengiklan. Dalam konteks politik, yang menjadi masalah ialah ketika pemilik media berafiliasi dengan partai politik. Hampir bisa dipastikan, pemberitaan tidak akan bertentangan dengan kebijakan partai politik yang berafiliasi dengan media tersebut.

4. *Extramedia Level*

Pengaruh luar media berasal dari pengiklan, kebijakan pemerintah, penonton, teknologi, dan pangsa pasar. Dengan kata lain, faktor eksternal mempengaruhi isi media karena semuanya menentukan kelangsungan media. Pengiklan memiliki kekuatan agar konten media tidak bertentangan dengan kepentingan produknya. Pemerintah bisa mengontrol pemberitaan dengan mengeluarkan Undang-undang apabila isi berita bertentangan dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Unsur berikutnya yaitu kemajuan teknologi turut mempengaruhi isi media. Kehadiran internet bahkan melahirkan era *new media* dan konvergensi media.

5. *Ideological Level*

Berbeda dengan level sebelumnya yang tampak konkret, level ideologi ini tampak abstrak. Reese dan Shoemaker mengutip pandangan teori kritis yang menyebutkan bahwa ideologi seperangkat kerangka pikir yang menentukan cara pandang kita terhadap dunia dan bagaimana kita harus bertindak. Level ideologi adalah level paling besar dalam model hierarki pengaruh isi media (Samuel Becker dalam Shoemaker dan Reese, 1996, p. 222).



Gambar 2.1. Model Hierarki Pengaruh Isi Media

(Sumber: Shoemaker, Pamela J dan Stephen D. Reese, 1966, p. 64).

Teori yang dikemukakan Shoemaker dan Reese ini membantu peneliti dalam memahami bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi isi media. Diantaranya, individu pekerja media, struktur organisasi, ideologi, pengiklan, pemerintah, dan lainnya. Hal ini membuktikan bahwa realitas yang diterima publik sudah melewati proses panjang kepentingan media.

D. Berita

Berita adalah produk utama dari aktivitas jurnalistik. Tanpa berita tidak akan ada organisasi media, dan tanpa organisasi media tidak akan ada berita, sehingga pembuatan keduanya saling berkaitan. Media menyediakan pengaturan distribusi dan penerimaan, serta jaminan kredibilitas dan otoritas. “Berita lahir dari peristiwa di dunia. Namun, tidak semua peristiwa layak atau memiliki nilai untuk diberitakan” (McQuail, 2012, p. 119).

Berita adalah laporan kejadian, peristiwa, gagasan atau fakta yang penting untuk diketahui publik. Menurut Assegaff, berita adalah laporan tentang fakta atau gagasan terkini yang diterbitkan oleh redaksi surat kabar dan dapat menarik perhatian pembaca, baik karena luar biasa, karena penting atau karena dampaknya, atau karena meliputi segi-segi *human interest* seperti humor, emosi dan ketegangan (Sumadiria, 2005, p. 64-65).

Secara umum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Tuchman (dalam Eriyanto, 2002, p. 126), wartawan menggunakan lima jenis berita: *hard news*, *soft news*, *live news*, dan *continuing news*. Kategori tersebut digunakan untuk membedakan jenis isi berita dan subjek peristiwa yang menjadi berita. Kelima kategori tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

1. *Hard News*

Hard news merupakan berita tentang peristiwa yang terjadi pada saat itu. Kategori berita ini dibatasi oleh aktualitas berita dan ketepatan waktu. Sebab, keberhasilan kategori berita ini diukur dari kecepatan pemberitaannya. Semakin cepat dipublikasikan maka semakin baik. *Hard news* sering dijadikan berita utama. Kategori berita ini digunakan untuk memeriksa sejauh mana informasi tersebut diberikan kepada publik dan secepat apa dapat diterima oleh publik. Peristiwa yang bisa dikategorikan sebagai *hard news* bisa peristiwa yang direncanakan atau yang tidak direncanakan.

2. *Soft News*

Soft news adalah berita ringan dan cenderung melaporkan peristiwa bernuansa manusiawi (*human interest*). Berbeda dengan *hard news* yang pelaporannya dibatasi waktu dan harus segera diberitakan, maka *soft news* tidak. Karena sifat *soft news* yang “tidak cepat basi”, maka ia bisa diberitakan kapan saja. Ukuran keberhasilan dari kategori berita ini bukan dari pentingnya informasi dan kecepatan publikasinya, melainkan apakah informasi yang dipublikasikan tersebut mampu menyentuh sisi perasaan dan emosi pembacanya.

Peristiwa yang dilaporkan adalah peristiwa yang terjadi pada saat itu dan dibatasi waktu, maka soft news tidak. Anda dapat melaporkan kapan saja. Karena ukuran kategori berita ini bukanlah informasi dan kecepatan saat khalayak menerimanya.

3. *Spot news*

Spot news adalah berita yang ditulis apa adanya berdasarkan fakta yang dilihat dan didengar pada lokasi kejadian. Dalam proses liputannya, *spot news* bersifat tidak bisa direncanakan dan ini termasuk ke dalam subklasifikasi *hard news*.

4. *Developing news*

Developing news juga masuk subklasifikasi dari *hard news*. *Developing news* digunakan untuk memberitakan perkembangan dari bagian rangkaian berita yang akan dilanjutkan besok atau dalam berita selanjutnya. Baik *spot news* maupun *developing news*, umumnya berkaitan dengan kejadian yang tidak terduga.

E. Paradigma Konstruktivisme

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme untuk melihat pemberitaan TWK yang dilakukan Tempo.co. Karena sejatinya berita merupakan hasil konstruksi dari realitas. Konstruksi realitas dalam konteks berita ialah reporter memiliki perspektifnya sendiri dalam menerima isu. Perspektif tersebut kemudian dikemas menjadi sebuah berita dan disampaikan kepada pembaca.

Menurut Vardiansyah (2008), paradigma adalah cara pandang individu terhadap dirinya dan lingkungan yang akan mempengaruhi cara berpikir, bersikap dan bertindak laku. Kajian ilmu komunikasi memiliki lima paradigma penelitian, yaitu: Paradigma Positivisme, Paradigma Post Positivisme, Paradigma Konstruktivisme, Paradigma Partisipatori, dan Paradigma Kritis (Bungin, 2007, p. 237). “Paradigma konstruktivisme melihat fenomena 'realitas' sebagai produk dan

penciptaan kognitif manusia” (Berger dan Luckmann, 1969, p. 39). Dengan demikian, “pemikiran konstruktivisme sangat meragukan kemampuan jurnalis untuk ‘mencerminkan’ realitas murni di lapangan seperti apa adanya” (Edgar, 1992, p. 112). Sebab, berita yang disajikan reporter adalah salah satu versi dari realitas di lapangan.

Von Glaserfeld dan Kitchener (dalam Ardianto, 2007, p. 155) menjelaskan gagasan konstruktivisme menurut pengetahuan sebagai berikut :

1. Pengetahuan bukanlah gambaran dunia kenyataan belaka, tetapi selalu merupakan konstruksi kenyataan melalui kegiatan subjek.
2. Subjek membentuk skema kognitif, kategori, konsep, dan struktur yang perlu untuk pengetahuan.
3. Pengetahuan dibentuk dalam struktur konsepsi seseorang. Struktur konsepsi membentuk pengetahuan bila konsepsi itu berlaku dalam berhadapan dengan pengalaman-pengalaman seseorang.

Menurut Eriyanto, “Pendekatan konstruksionis memusatkan perhatian kepada bagaimana seseorang membuat gambaran mengenai sebuah peristiwa politik, personalitas, konstruksi melalui mana realitas politik dibentuk dan dikuasai. Semua individu, lembaga atau kelompok mempunyai peran yang sama dalam menafsirkan dan mengonstruksi peristiwa politik”, (Bungin, 2008, p. 155).

Paradigma konstruksionis memiliki beberapa penilaian bagaimana media, wartawan, dan berita dilihat, (Eriyanto, 2015, p.22) diantaranya :

1. Peristiwa atau fakta merupakan hasil konstruksi.
2. Media adalah subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan dan keberpihakannya.
3. Etika, pilihan moral, dan keberpihakan wartawan adalah bagian yang terpadu dari produksi berita.
4. Pilihan moral, nilai, dan etika peneliti menjadi bagian integral dalam penelitian.

5. Reporter bukanlah pelapor, melainkan agen konstruksi sebuah realitas.
6. Berita bukan refleksi dari realitas, melainkan dikonstruksi dari realitas.
7. Berita bersifat subjektif atau konstruktif atas realitas.
8. Khalayak memiliki penilaian tersendiri terhadap berita.

F. Framing

Framing adalah membingkai sebuah peristiwa. Analisis *framing* adalah metode analisis yang digunakan untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas (kelompok, individu, peristiwa, dan lainnya). Analisis *framing* juga dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Sudibyo (2001, p. 186) menjelaskan “*framing* merupakan metode penyajian realitas di mana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus, dengan memberikan penonjolan terhadap aspek-aspek tertentu, dengan menggunakan istilah-istilah yang punya konotasi tertentu, dan dengan bantuan foto, karikatur, dan alat ilustrasi lainnya”.

Dalam ilmu komunikasi, analisis *framing* dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau mudah diingat, untuk menggiring interpretasi publik sesuai perspektifnya. Dengan kata lain, *framing* adalah pendekatan untuk “mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak dibawa ke mana berita tersebut” (Sobur, 2001, p. 162).

Seperti yang dikatakan Todd Gitlin, *framing* adalah sebuah strategi bagaimana realitas atau dunia dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak pembaca. Peristiwa-peristiwa ditampilkan

dalam pemberitaan agar tampak menonjol dan menarik perhatian khalayak pembaca. Frame adalah prinsip dari seleksi, penekanan dan presentasi dari realitas (Eriyanto, 2012, p. 68).

Analisis *framing* mempertanyakan mengapa peristiwa A diberitakan? Mengapa fakta tertentu yang ditonjolkan sedangkan yang lain tidak? Mengapa sisi atau *angle* tertentu yang ditonjolkan sedangkan yang lain tidak? *Framing* digunakan media untuk memberi penekanan atau menonjolkan aspek tertentu sesuai kepentingan dan ideologi medianya. Akibatnya, hanya bagian tertentu saja yang dianggap penting dan lebih diperhatikan oleh publik.

G. Framing Model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki

Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki menunjukkan bahwa kerangka konsep *framing* memiliki dua konsep yang saling terkait. Pertama, dalam konsep psikologis, yaitu bagaimana seseorang mengolah informasinya dalam dirinya, dan bagaimana seseorang mengolah sejumlah besar informasi serta mengekspresikannya dengan cara tertentu. Kedua, konsep sosiologis adalah bagaimana individu memaknai peristiwa melalui perspektif tertentu. Bagaimana seseorang mengatur, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan pengalaman sosialnya untuk memahami realitas dirinya dan sekitarnya (Eriyanto, 2002, p. 252-253).

Dalam metode ini, perangkat *framing* dapat dibagi menjadi empat struktur utama. Pertama, struktur sintaksis berkaitan dengan bagaimana reporter menyusun informasi atas peristiwa ke dalam bentuk umum struktur berita. Kedua, struktur skrip berkaitan dengan cara reporter menceritakan dan mengisahkan peristiwa dalam bentuk berita. Ketiga, struktur tematik menganalisis..bagaimana fakta yang ditulis reporter ke dalam berita ditinjau dari koherensinya. Keempat, struktur retorik berkaitan dengan bagaimana reporter memberi penekanan arti tertentu ke dalam berita (Eriyanto, 2002, p. 294).



Gambar 2.2 Perangkat Analisis Model Zhongdang Pan dan M. Kosicki

(Sumber: Eriyanto, 2005, p. 256).

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak lepas dari penelitian terdahulu, maka peneliti mencari beberapa referensi skripsi dan jurnal untuk dijadikan pedoman, acuan, dan menghindari kesamaan terhadap penelitian yang telah ada. Adapun penelitian terdahulu yang telah peneliti rangkum sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Rendi Mahendra, mahasiswa IAIN Ponorogo berjudul “*Kebijakan Impor Beras Dalam Bingkai Media (Analisis Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki Terhadap Pemberitaan Kebijakan Impor Beras di Republika Online Periode 10 Januari-17 Januari 2018)*”. Hasil

penelitian membuktikan konstruksi pemberitaan impor beras yang dilakukan oleh Republika Online lebih menekankan pada penolakan impor beras. Republika Online melakukan pembingkaiannya dengan beberapa cara terlihat dari: pemilihan narasumber, sumber berita, dan foto yang dipakai. Elemen tersebut digunakan untuk mendukung struktur framing yang dibangun Republika Online.

Skripsi yang ditulis oleh Hepi Fauzi, mahasiswa asal UIN Sunan Ampel dengan judul "*Analisis Framing Model Pan dan Kosicki Berita Kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2019 Pada Media Cetak Harian Duta Masyarakat*". Hasil penelitiannya adalah: framing yang dilakukan media cetak Harian Duta Masyarakat terhadap pemberitaan Kampanye Pilpres 2019 sarat akan keberpihakan terhadap paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi yang tak lepas dari kepentingan pemilik media.

Contoh lainnya, skripsi dengan judul "*Analisis Framing Pemberitaan Demonstrasi Mahasiswa Tentang Penolakan RUU KUHP di Harian Waspada dan Analisa Medan Edisi September 2019*" yang ditulis oleh Ratna Sari Harahap, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan framing kedua media cetak terhadap teks berita memperlihatkan perbedaan dalam membingkai berita demonstrasi mahasiswa tentang penolakan RUU KUHP. Harian Waspada menggunakan *frame* di bidang sosial, sedangkan Harian Analisa menggunakan *frame* di bidang hukum dan sosial politik dan lebih memihak kepada pemerintah. Sehingga menurut peneliti, kedua media tersebut belum netral.

Ketiga penelitian tersebut sama-sama menggunakan analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Perbedaannya terletak pada berita dan media yang diteliti.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memakai metode kualitatif. Metode kualitatif menitikberatkan pada prinsip-prinsip umum yang menjadi perwujudan makna dari fenomena sosial yang ada di masyarakat. Objek penelitian metode kualitatif adalah pemaknaan fenomena sosial budaya, yaitu pemanfaatan budaya masyarakat untuk memperoleh gagasan kategorisasi tertentu (Bungin, 2006, p. 302). Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif karena sering digunakan untuk mengetahui makna teks.

Metode analisis kualitatif menggunakan metode logika induktif yang dibentuk berdasarkan hal-hal tertentu atau data lapangan, dan diakhiri dengan hal-hal yang umum. Analisis ini tidak mencari data frekuensi, tetapi menganalisis data manifes. Analisis ini tidak bertujuan untuk menjelaskan fakta, melainkan untuk memahami fakta.

Penelitian ini juga termasuk ke dalam jenis penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif memiliki tujuan untuk menguraikan sebuah persoalan yang sudah memiliki gambaran yang jelas, dan bermaksud untuk mengeksplorasi secara lebih mendalam. Peneliti berusaha mencari tahu sebab dan alasan mengapa peristiwa itu bisa terjadi, diantaranya dengan menjelaskan secara akurat mengenai suatu topik masalah, menghubungkannya dengan topik-topik yang berbeda namun masih memiliki keterkaitan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tidak ada lokasi fisik dalam penelitian ini karena objek yang diteliti berupa teks berita pada situs Tempo.co. Proses penelitian dimulai terhitung sejak bulan Juni 2021 di Kota Binjai sebagai tempat tinggal peneliti.

C. Pemilihan Objek Penelitian

Objek yang diteliti berupa teks berita terkait tes wawasan kebangsaan pegawai KPK pada Tempo.co periode 11 Mei hingga 26 Mei 2021. Lima berita yang telah dipilih pada periode tersebut adalah:

1. Jokowi Tak Setuju TWK Dijadikan Dasar untuk Berhentikan 75 Pegawai KPK.
2. ICW Duga Ada Persekongkolan di Balik Asesmen TWK Pegawai KPK.
3. 51 Pegawai KPK Mau Dipecat, Novel Baswedan: Kami Berupaya Hingga Batas Akhir.
4. 51 Pegawai Dipecat, Moeldoko: Sudah Final, Kita Beri Kepercayaan Penuh KPK.
5. Pimpinan KPK: Kami Sayang pada 75 Pegawai.

Subjek penelitiannya ialah cara media maupun reporter membingkai berita tersebut.

D. Tahapan Penelitian

Tahap penelitian yang akan dilakukan dimulai dengan memilih berita yang berkaitan dengan polemik hasil tes wawasan kebangsaan pegawai KPK dalam Tempo.co pada periode 11 Mei hingga 26 Mei 2021. Kemudian, teks berita yang sudah dipilih dianalisis sesuai dengan empat perangkat analisis yang digunakan lalu menjabarkannya. Sampai nanti di akhir peneliti menyampaikan kesimpulan yang didapat dari hasil analisis yang telah dilakukan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua macam teknik yaitu:

- a. Studi Dokumen (*Documentary Research*)

Penelitian ini mengumpulkan data yang akan dianalisis lewat beberapa teks berita yang sudah terbit pada situs Tempo.co dalam periode yang telah disebutkan sebelumnya. Peneliti mencatat seluruh teks berita yang ditulis oleh reporter yang temanya relevan dengan penelitian ini.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini mengumpulkan seluruh data yang berasal dari bahan bacaan serta literatur yang relevan dengan penelitian ini. Hal tersebut dilakukan dengan cara membaca tulisan-tulisan, literatur, dokumen, serta buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis *framing*. *Framing* dimaknai sebagai proses membuat suatu pesan lebih menonjol atau memberikan penekanan aspek tertentu. Akibatnya, bagian yang ditonjolkan saja yang dianggap lebih bermakna, lebih penting oleh khalayak. Secara sederhana, *framing* dipahami sebagai sebuah analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (kelompok, individu, peristiwa, dan lainnya) dibingkai oleh media.

Analisis *framing* juga menerapkan konsep-konsep sosiologis, politik, dan kultural untuk menganalisis fenomena komunikasi, sehingga suatu fenomena dapat diapresiasi dan dianalisis berdasarkan konteks sosiologis, politik, atau kultural yang meliputinya (Sudibyo, 1999, p. 176).

Analisis *framing* merupakan dasar struktur kognitif yang memandu cara pandang dan cerminan realitas dalam membongkar ideologi dibalik penulisan informasi. Analisis *framing* juga menjelaskan bahwa latar belakang budaya membentuk pemahaman terhadap sebuah peristiwa. Dalam penelitian ini penulis menggunakan model analisis *framing* yang dikembangkan oleh Zhongdang Pan

dan Gerald M. Kosicki. Model ini mempunyai empat struktur sebagai komponen analisisnya (dalam Eriyanto, 2005, p. 66), yaitu:

1. Sintaksis

Sintaksis berkaitan dengan bagaimana reporter menyusun opini, kutipan, pernyataan, informasi, pengamatan atas peristiwa ke dalam bentuk umum susunan berita. Hal ini dapat dilihat dari bagan berita (*lead* yang digunakan, latar informasi, *headline*, kutipan yang diambil, dan sebagainya). Pada intinya dari sintaksis ini dilihat bagaimana reporter memahami peristiwa yang dapat diamati dari cara ia menyusun fakta ke dalam bentuk umum berita.

2. Skrip

Skrip berkaitan dengan bagaimana reporter menceritakan atau mengisahkan peristiwa ke dalam bentuk berita. Struktur ini mengamati bagaimana strategi cara bertutur atau bercerita yang dipakai oleh reporter dalam mengemas peristiwa ke dalam bentuk berita.

3. Tematik

Tematik menganalisis bagaimana fakta yang ditulis reporter dalam berita ditinjau dari koherensinya. Koherensi adalah hubungan antar kata dan kalimat. Ada tujuh jenis koherensi menurut Sumadi (dalam Hartanti, 2007, p. 43), yaitu:

- a. Koherensi kausalitas adalah hubungan makna sebab-akibat antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain.
- b. Koherensi kontras adalah hubungan makna pertentangan atau perlawanan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain ditandai dengan kata pertentangan.
- c. Koherensi aditif adalah hubungan makna penambahan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain ditandai dengan konjungsi tertentu misalnya dan, di samping itu, lagipula.
- d. Koherensi temporal adalah hubungan makna waktu antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain.

- e. Koherensi kronologis adalah hubungan rangkaian waktu. Koherensi ini sering ditunjukkan dengan konjungsi yang menyatakan temporal (sesudah itu, kemudian, lalu, ini), penanda kala (sekarang, dulu), dan penanda aspek (sudah, belum, akan).
- f. Koherensi perurutan adalah hubungan makna yang menyatakan perbuatan yang harus dilakukan secara berurutan.
- g. Koherensi intensitas adalah hubungan makna penyangatan yang terdapat pada sejumlah penanda, berfungsi sebagai penghubung antarkalimat yang satu dengan kalimat yang lain.

4. Retoris

Struktur retorik berkaitan dengan bagaimana reporter memberi penekanan arti tertentu ke dalam berita. Struktur ini akan melihat bagaimana diksi, grafik, idiom, foto dan gambar yang digunakan reporter bukan hanya mendukung, melainkan juga menekankan arti tertentu kepada khalayak.

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu dilakukan pengecekan terhadap data yang telah dikumpulkan. Hal ini bisa dilakukan menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data. Untuk memperoleh datanya, peneliti melakukan *documentary research*. Yaitu proses penelitian yang fokus meneliti skrip atau dokumen, atau dalam hal ini menggunakan teks berita sebagai sasaran utama dalam analisis, tanpa melakukan wawancara. Peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk memeriksa keabsahan data.

Sugiyono (2013, p. 330) menjelaskan “triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teori dan perspektif untuk menafsirkan data, dibantu dengan berbagai teori untuk memberikan pemahaman ketika memahami data. Dari beragam teori dapat dihasilkan kesimpulan yang sama.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Tempo.co

Tempo adalah portal berita dan artikel daring bagian dari grup PT. Tempo Inti Media yang berdiri sejak 1996. Didirikan oleh Yusril Djalinus, Bambang Bujono, S. Prinka, dan Saiful B. Ridwan. Tempo menempati kantor yang beralamat di Jl. Palmerah Barat No. 8, Jakarta Selatan.

Isi berita dibagi berdasarkan beberapa jenis berita, diantaranya: nasional dan hukum, metro, ekonomi dan bisnis, olahraga, teknologi, gaya hidup, internasional, seni dan hiburan, selebritas, sains, olahraga dan otomotif.

Sejak 2008, Tempo.co telah lahir kembali sebagai platform penyedia berita digital dalam bentuk situs web dan aplikasi seluler. Kini, Tempo.co telah memiliki *unique visitor* sebanyak 35 juta per bulan dan 6,8 juta pengikut di seluruh *platform* media sosial.



Gambar 4.1 Tangkapan layar beranda Tempo.co

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Analisis Berita

Judul : Jokowi Tak Setuju TWK Dijadikan Dasar Untuk Berhentikan 75 Pegawai KPK



Presiden Joko Widodo memberikan arahan dalam acara peresmian pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 4 Mei 2021. ANTARA/BPMI Setpres/Lukas

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar tes wawasan kebangsaan (TWK) yang diikuti pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak dijadikan dasar untuk memutuskan nasib para pegawai KPK. Ia meminta agar 75 pegawai yang sebelumnya dinyatakan tak lulus TWK, tak begitu saja diberhentikan.

"Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos tes," kata Jokowi dalam pernyataannya, Senin, 17 Mei 2021.

TWK ini dibuat sebagai salah satu syarat peralihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Peralihan status ini, kata Jokowi, adalah bentuk upaya pemberantasan korupsi yang lebih sistematis. Namun ia menegaskan TWK tak bisa dijadikan dasar penilaian begitu saja.

"Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki lewat pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan perlu segera dilakukan langkah perbaikan di level individual maupun organisasi," kata Jokowi.

Ia pun mengatakan sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua UU KPK, yang menyatakan bahwa proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN tak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.

"Saya minta kepada para pihak yang terkait khususnya pimpinan KPK, Menteri PAN RB, dan kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lulus tes dengan prinsip-prinsip yang saya sampaikan tadi," kata Jokowi.

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	<i>Headline</i>	Jokowi Tak Setuju TWK Dijadikan Dasar Untuk Berhentikan 75 Pegawai KPK.
	<i>Lead</i>	Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar tes wawasan kebangsaan (TWK) yang diikuti pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak dijadikan dasar untuk memutuskan nasib para pegawai KPK. Ia meminta agar 75 pegawai yang sebelumnya dinyatakan tak lulus TWK, tak begitu saja diberhentikan.
	Latar Informasi	Presiden Jokowi meminta agar 75 pegawai yang tak lulus, tak begitu saja diberhentikan.
	Kutipan Sumber	<p>Presiden Jokowi</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos tes.” - “Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki lewat pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan perlu segera dilakukan langkah perbaikan di level individual maupun organisasi.” - “Saya minta kepada para pihak yang terkait

		<p>khususnya pimpinan KPK, Menteri PAN RB, dan Kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lulus tes dengan prinsip-prinsip yang saya sampaikan tadi.”</p>
	Pernyataan	<ul style="list-style-type: none"> - Peralihan status ini, kata Jokowi, adalah bentuk upaya pemberantasan korupsi yang lebih sistematis. - Ia pun mengatakan sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua UU KPK, yang menyatakan bahwa proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN tak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.
	Penutup	<p>“Saya minta kepada para pihak yang terkait khususnya pimpinan KPK, Menteri PAN RB, dan Kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lulus tes dengan prinsip-prinsip yang saya sampaikan tadi,” kata Jokowi.</p>
Struktur Skrip	What	Presiden Jokowi tidak setuju TWK dijadikan dasar untuk menghentikan 75 pegawai KPK.
	Where	Istana Negara
	When	17 Mei 2021
	Who	Presiden Jokowi
	Why	TWK ini dibuat sebagai salah satu syarat peralihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

	How	Jokowi sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua UU KPK, yang menyatakan bahwa proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN tak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat.	Koherensi Kontras Namun , ia menegaskan TWK tak bisa dijadikan dasar penilaian begitu saja.
Struktur Retoris	Kata	- Nasib - Sistematis
	Idiom	Tidak ada dalam teks berita.
	Gambar/foto	Presiden Joko Widodo memberikan arahan dalam acara peresmian pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 4 Mei 2021. ANTARA/BPMI Setpres/Lukas.
	Grafik	Tidak ada dalam teks berita.

Analisis

a. Struktur Sintaksis

Headline “Jokowi Tak Setuju TWK Dijadikan Dasar Untuk Berhentikan 75 Pegawai KPK” sudah merangkum seluruh hal yang menjadi inti berita. Judul ini merepresentasikan sikap Jokowi terhadap polemik TWK. *Headline* tersebut mampu menarik perhatian pembaca karena akhirnya Presiden angkat bicara

terhadap polemik yang terjadi di KPK. Namun pernyataan yang disampaikan Jokowi terkesan terlambat dan karena didesak publik. Sebagaimana Pakar Hukum Bivitri Susanti yang menilai selama ini Jokowi tidak bersuara bila ada upaya pelemahan KPK. Memang, selama kekisruhan terjadi, ini adalah berita pertama yang berisi sikap Jokowi terhadap TWK KPK. Hal lain yang disampaikan Bivitri ialah mengapa Presiden baru sekarang menyatakan tidak setuju, sedangkan dulu Presiden Jokowi menyetujui revisi UU KPK yang menjadi penyebab polemik ini.

Tempo menggunakan jenis *lead* ringkasan (*summary lead*) karena *lead* tersebut sudah berisikan inti dari berita ini. Pembaca sudah bisa memahami seluruh berita tanpa harus melanjutkan ke paragraf berikutnya.

Latar informasi dalam berita ini muncul karena tidak adanya kejelasan nasib pegawai KPK yang tidak lulus TWK. Maka muncul pernyataan Jokowi yang tidak setuju jika TWK dijadikan dasar untuk memberhentikan pegawai KPK. Sebab, beliau sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi bahwa peralihan status menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai.

Berita ditutup dengan arahan Jokowi kepada KPK, Menteri PAN RB, dan kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK sesuai prinsip yang ia sampaikan.

b. Struktur Skrip

Berita “*Jokowi Tak Setuju TWK Dijadikan Dasar Untuk Berhentikan 75 Pegawai KPK*” sudah memenuhi unsur 5W+1H. Berita ini lebih menekankan unsur (*why*), yaitu alasan mengapa Jokowi tidak setuju jika 75 pegawai KPK diberhentikan begitu saja.

c. Struktur Tematik

Dalam berita hanya ditemukan satu jenis koherensi yakni Koherensi Kontras pada paragraf ketiga. Karena sebagian besar berita ini berisi kutipan langsung dari Presiden Jokowi. Koherensi yang terdapat dalam kutipan narasumber tidak dianggap masuk ke dalam Struktur Tematik karena analisis framing difokuskan kepada cara reporter menyusun berita.

d. Struktur Retoris

Kata “sistematis” menekankan pernyataan Jokowi bahwa TWK ini diadakan sebagai syarat pengalihan status pegawai. Sehingga upaya pemberantasan korupsi lebih teratur, sistematis. Bukan dijadikan dasar penilaian untuk memberhentikan pegawai.

Kemudian, berita dilengkapi dengan foto Jokowi memberikan arahan dalam Musrenbangnas di Istana Negara pada 4 Mei 2021. Padahal pernyataan Presiden Jokowi di dalam berita disampaikan pada tanggal 17 Mei 2021. Mengutip berita yang sama dan terbit pada tanggal yang sama, media online seperti Bisnis.com menggunakan foto yang sesuai. Foto tersebut ialah Presiden Jokowi mengenakan pakaian Batik sambil duduk di Istana menyampaikan pendapatnya soal TWK ini. Karena setelah ditelusuri, pernyataan yang disampaikan Jokowi ini memang disampaikan dalam video saat beliau sedang berada di Istana Presiden dan videonya diunggah pada kanal YouTube Sekretariat Presiden RI.

2. Analisis Berita

Judul : ICW Duga Ada Persekongkolan di Balik Asesmen TWK Pegawai KPK



Dari kiri, Akademisi hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, Peneliti Bidang Korupsi dan Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrin, Kurnia Ramadhana dan Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam disela berdiskusi bertemakan KPK Dalam Ancaman: 60 Hari Pasca Penyerangan Novel Baswedan Hingga Angket DPR di Jakarta, 11 Juni 2017. ICW menilai bahwa pembentukan panitia Angket terkesan dipaksakan, cacat hukum dan berpotensi menimbulkan kerugian negara atas segala biaya yang dikeluarkan oleh proses penyelidikan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga jika pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak bergerak sendiri dalam menjalankan asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap para pegawai KPK.

"Pimpinan KPK kami yakin tidak bergerak sendiri, ada pola yang terbentuk, ada kerja sama dengan kelompok tertentu," ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana melalui konferensi pers daring pada Rabu, 26 Mei 2021.

Kecurigaan Kurnia bukan tanpa alasan. Ia mengatakan usai kejanggalan 75 pegawai tak lulus TWK menjadi ramai diberitakan, banyak aksi penyerangan terhadap mereka yang membela puluhan pegawai tersebut.

Mulai dari ramainya pendengung (buzzer) di media sosial yang menyudutkan kinerja KPK, hingga upaya peretasan terhadap mantan pegawai KPK dan penggiat antikorupsi.

Alhasil, Kurnia meyakini bahwa beragam aksi penyerangan itu bukan kerja pimpinan KPK semata. "Kami yakin ini pasti bukan kerja pimpinan atau spesifik, bukan kerja individu Firli Bahuri semata. Yang pasti ada pola, ada persekongkolan jahat terjadi di balik TWK," kata dia.

Pelaksanaan TWK yang berujung pada penonaktifan 75 pegawai KPK telah menjadi polemik belakangan ini. Pimpinan KPK dituding menyelundupkan aturan soal TWK itu di Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021. Menurut sejumlah pegawai, aturan itu sebelumnya tidak pernah dibahas pada penyusunan draf aturan.

Terbaru, KPK memutuskan untuk menonaktifkan 51 dari 75 pegawai. Mereka dianggap masuk daftar merah alias sudah tidak bisa dibina lagi.

Keputusan itu bertolak belakang dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pegawai yang tak lolos diberi peluang untuk memperbaiki. Di sisi lain, pemecatan terhadap 51 pegawai KPK juga bertentangan dengan pernyataan Firli Bahuri sendiri yang tidak ada niat untuk memecat Novel Baswedan dan kawan-kawan.

"Kami ingin pastikan sampai hari ini tidak pernah KPK memberhentikan, tidak pernah KPK memecat dan tidak pernah juga berpikir KPK untuk menghentikan dengan hormat maupun tidak hormat," ucap Ketua KPK Firli Bahuri melalui konferensi pers daring pada Kamis, 20 Mei 2021.

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	<i>Headline</i>	ICW Duga Ada Persekongkolan di Balik Asesmen TWK Pegawai KPK
	<i>Lead</i>	Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga jika pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak bergerak sendiri dalam menjalankan asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap para pegawai KPK.
	Latar Informasi	ICW meyakini bahwa beragam aksi penyerangan itu bukan kerja pimpinan KPK semata.
	Kutipan Sumber	<p>Kurnia Ramadhana (Peneliti ICW)</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Pimpinan KPK kami yakin tidak bergerak sendiri, ada pola yang terbentuk, ada kerja sama dengan kelompok tertentu.” - “Kami yakin ini pasti bukan kerja pimpinan KPK atau spesifik, bukan kerja individu Firli Bahuri semata. Yang pasti ada pola, ada persekongkolan jahat terjadi di balik TWK.” <p>Firli Bahuri (Ketua KPK)</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Kami ingin pastikan sampai hari ini tidak pernah KPK memberhentikan, tidak pernah KPK memecat Novel Baswedan dan tidak pernah juga berpikir KPK untuk memberhentikan dengan hormat maupun tidak hormat.” - “Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan

		<p>untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos tes.”</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki lewat pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan perlu segera dilakukan langkah perbaikan di level individual maupun organisasi.” - “Saya minta kepada para pihak yang terkait khususnya pimpinan KPK, Menteri PAN RB, dan Kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lulus tes dengan prinsip-prinsip yang saya sampaikan tadi.”
	Pernyataan	<ul style="list-style-type: none"> - Ia mengatakan usai kegagalan 75 pegawai tak lulus TWK menjadi ramai diberitakan, banyak aksi penyerangan terhadap mereka yang membela puluhan pegawai tersebut. - Menurut sejumlah pegawai, aturan itu sebelumnya tidak pernah dibahas pada penyusunan draf aturan.
	Penutup	<p>“Kami ingin pastikan sampai hari ini tidak pernah KPK memberhentikan, tidak pernah KPK memecat Novel Baswedan dan tidak pernah juga berpikir KPK untuk memberhentikan dengan hormat</p>

		maupun tidak hormat,” ucap ketua KPK Firli Bahuri melalui konferensi pers daring pada Kamis, 20 Mei 2021.
Struktur Skrip	What	Kurnia Ramadhana (Peneliti ICW) mencurigai pimpinan KPK tidak bergerak sendiri dalam menjalankan TWK.
	Where	Tidak ada dalam teks berita.
	When	26 Mei 2021
	Who	Kurnia Ramadhana (Peneliti ICW) dan Firli Bahuri (Ketua KPK)
	Why	Banyak aksi penyerangan terhadap mereka yang membela puluhan pegawai KPK yang tak lolos.
	How	Mulai dari ramainya pendengung (buzzer) di media sosial yang menyudutkan kinerja KPK, hingga upaya peretasan terhadap mantan pegawai KPK dan penggiat antikorupsi.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat.	<p>Koherensi Kausalitas</p> <p>Alhasil, Kurnia meyakini bahwa beragam aksi penyerangan itu bukan kerja pimpinan KPK semata.</p> <p>Koherensi Kontras</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keputusan itu bertolak belakang dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pegawai yang tak lolos diberi peluang untuk memperbaiki. - Di sisi lain, pemecatan terhadap 51 pegawai KPK juga bertentangan dengan pernyataan Firli Bahuri sendiri yang tidak ada niat untuk memecat Novel Baswedan

		<p>dan kawan-kawan.</p> <p>Koherensi Aditif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hingga upaya peretasan terhadap mantan pegawai KPK dan penggiat antikorupsi. - Tidak ada niat untuk memecat Novel Baswedan dan kawan-kawan. <p>Koherensi Kronologis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mulai dari ramainya pendengung (buzzer) di media sosial yang menyudutkan kinerja KPK - Menurut sejumlah pegawai, aturan itu sebelumnya tidak pernah dibahas pada penyusunan draf aturan. - Terbaru, KPK memutuskan untuk menonaktifkan 51 dari 75 pegawai.
Struktur Retoris	Kata	<ul style="list-style-type: none"> - Buzzer - Persekongkolan - Daftar Merah - Menyelundupkan
	Idiom	Tidak ada dalam teks berita.
	Gambar/foto	Dari kiri, Akademisi hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, Peneliti Bidang Korupsi dan Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrin, Kurnia Ramadhana dan Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam disela berdiskusi bertemakan KPK Dalam Ancaman: 60 Hari Pasca Penyerangan Novel Baswedan Hingga Angket DPR di Jakarta, 11 Juni 2017. ICW

		menilai bahwa pembentukan panitia Angket terkesan dipaksakan, cacat hukum dan berpotensi menimbulkan kerugian negara atas segala biaya yang dikeluarkan oleh proses penyelidikan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho.
	Grafik	Tidak ada dalam teks berita.

Analisis

a. Struktur Sintaksis

Headline “ICW Duga Ada Persekongkolan di Balik Asesmen TWK Pegawai KPK” dikutip dari pernyataan Kurnia Ramadhana. Kata “persekongkolan” digunakan untuk menggambarkan kecurigaan yang disampaikan Kurnia Ramadhana, sebagaimana yang ia katakan bahwa oknum pimpinan KPK bekerja sama dengan pihak tertentu untuk melakukan peretasan terhadap mantan pegawai KPK dan pegiat antikorupsi tepat setelah kejanggalan TWK ramai diberitakan.

Paragraf *lead* belum banyak memuat informasi penting, masih berupa pengulangan kalimat seperti yang tertulis pada *headline*. Sehingga, untuk mendapatkan informasi yang lebih mendetail, pembaca harus melanjutkan ke paragraf selanjutnya.

Latar informasi dalam berita muncul karena banyaknya aksi penyerangan terhadap pegiat antikorupsi dan mereka yang membela puluhan Pegawai KPK setelah polemik ini ramai diberitakan. Serangan yang dimaksud Kurnia dijelaskan pada paragraf keempat, “Mulai dari ramainya pendengung (*buzzer*) di media sosial yang menyudutkan kinerja KPK, hingga upaya peretasan terhadap mantan pegawai KPK dan pegiat antikorupsi. Hal inilah yang memicu kecurigaan Kurnia Ramadhana.

Berita ini ditutup dengan klarifikasi yang disampaikan ketua KPK Firli Bahuri bahwasanya KPK tidak pernah memiliki niat untuk memberhentikan

pegawainya. “Kami ingin pastikan sampai hari ini tidak pernah KPK memberhentikan, tidak pernah KPK memecat Novel Baswedan dan tidak pernah juga berpikir KPK untuk memberhentikan dengan hormat maupun tidak hormat,” ucap ketua KPK Firli Bahuri melalui konferensi pers daring pada Kamis, 20 Mei 2021.

b. Struktur Skrip

Berita “ICW Duga Ada Persekongkolan di Balik Asesmen TWK Pegawai KPK” tidak memenuhi unsur 5W+1H karena tidak terdapat unsur *where*. Hal itu dikarenakan tidak ada lokasi fisik liputan sebab apa yang disampaikan ICW dan pimpinan KPK melalui konferensi pers daring pada waktu yang berbeda. Meskipun terlihat sepele, tiap unsur berita sangat penting agar bisa dipertanggungjawabkan tiap fakta yang disampaikan.

c. Struktur Tematik

Berita “ICW Duga Ada Persekongkolan di Balik Asesmen TWK Pegawai KPK” memiliki empat jenis koherensi yaitu: Koherensi Kausal, Koherensi Kontras, Koherensi Aditif, dan Koherensi Kronologis.

Dari keseluruhan berita ini, reporter menekankan Koherensi Kronologis penyerangan terhadap pegiat antikorupsi dan ramainya *buzzer* di media sosial.

d. Struktur Retoris

Reporter menggunakan kata “menyelundupkan” pada paragraf ke enam “Pimpinan KPK dituding *menyelundupkan* aturan soal TWK...” untuk menggambarkan cara sembunyi-sembunyi yang dilakukan pimpinan KPK.

Ini adalah berita kedua dari Tempo.co dengan foto yang tidak sesuai isi berita. Foto yang disertakan yaitu foto kegiatan diskusi KPK Dalam Ancaman: 60

Hari Pasca Penyerangan Novel Baswedan yang diadakan pada 11 Juni 2017. Tidak sesuai dengan tanggal saat Kurnia Ramadhana menyampaikan kecurigaannya melalui konferensi pers daring, yakni pada tanggal 26 Mei 2021.

3. Analisis Berita

Judul : 51 Pegawai KPK Mau Dipecat, Novel Baswedan: Kami Berupaya Hingga Batas Akhir



Penyidik Senior KPK Novel Baswedan menyapa wartawan saat tiba di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin, 24 Mei 2021. Perwakilan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) didampingi beberapa lembaga hukum melakukan pengaduan terkait dugaan pelanggaran HAM pada asesmen TWK. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, menilai jumlah pegawai yang dipecat berubah dari 75 menjadi 51 menggambarkan bahwa tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai alat untuk menyingkirkan pegawai tertentu yang telah ditarget sebelumnya.

"Hal ini mengkonfirmasi dan semakin jelas terlihat bahwa ada agenda dari oknum Pimpinan KPK untuk menyingkirkan pegawai KPK yang bekerja baik," kata Novel dalam keterangannya, Selasa, 25 Mei 2021.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengatakan 51 pegawai KPK dinyatakan tidak bisa bergabung lagi dengan komisi antirasuah alias dipecat. Sebanyak 51 pegawai itu merupakan bagian dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK. Menurut Alex, mereka ini warnanya merah.

Novel mengatakan, oknum pimpinan KPK tetap melakukan rencana awal untuk menyingkirkan pegawai KPK melalui TWK, sekalipun bertentangan dengan norma hukum dan arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Meski ada agenda untuk menyingkirkan pegawai KPK berkualitas, Novel meyakini para pegawai tetap semangat karena tidak semua perjuangan membuahkan hasil.

"Tetapi kami ingin memastikan bahwa perjuangan memberantas korupsi yang merupakan harapan masyarakat Indonesia ini harus dilakukan hingga akhir, sehingga bilapun tidak berhasil maka kami akan dengan tegak mengatakan bahwa kami telah berupaya dengan sungguh-sungguh, hingga batas akhir yang bisa diperjuangkan," ucap Novel.

Menurut Novel, upaya pelemahan terhadap KPK bukan hal baru. Penyingkiran pegawai KPK yang ditarget, kata dia, bisa jadi merupakan tahap akhir untuk mematikan perjuangan pemberantasan korupsi.

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	<i>Headline</i>	51 Pegawai KPK Mau Dipecat, Novel Baswedan: Kami Berupaya Hingga Batas Akhir
	<i>Lead</i>	Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, menilai jumlah pegawai yang dipecat berubah dari 75 menjadi 51 menggambarkan bahwa tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai alat untuk menyingkirkan pegawai tertentu yang telah ditarget sebelumnya.
	Latar Informasi	Penyingkiran pegawai KPK yang ditarget, menurut Novel, bisa jadi merupakan tahap akhir untuk mematikan perjuangan pemberantasan korupsi.
	Kutipan Sumber	Novel Baswedan (Penyidik KPK) <ul style="list-style-type: none"> - “Hal ini mengkonfirmasi dan semakin terlihat jelas bahwa ada agenda dari oknum Pimpinan KPK untuk menyingkirkan pegawai KPK yang bekerja baik.” - “Tetapi kami ingin memastikan bahwa perjuangan memberantas korupsi yang merupakan harapan masyarakat Indonesia ini harus dilakukan hingga akhir, sehingga bilapun tidak berhasil maka kami akan dengan tegak mengatakan bahwa kami telah berupaya dengan sungguh-sungguh, hingga batas akhir yang bisa diperjuangkan.”
	Pernyataan	- Novel Baswedan, menilai jumlah pegawai yang dipecat berubah dari 75 menjadi 51 menggambarkan bahwa tes wawasan

		<p>kebangsaan (TWK) sebagai alat untuk menyingkirkan pegawai tertentu yang telah ditarget sebelumnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengatakan 51 pegawai KPK dinyatakan tidak bisa bergabung lagi dengan komisi antirasuah alias dipecat. - Menurut Alex, mereka ini warnanya merah. - Novel mengatakan, oknum Pimpinan KPK tetap melakukan rencana awal untuk menyingkirkan pegawai KPK melalui TWK - Novel meyakini para pegawai tetap semangat karena tidak semua perjuangan membuahkan hasil. - Menurut Novel, upaya pelemahan terhadap KPK bukan hal baru.
	Penutup	Menurut Novel, upaya pelemahan terhadap KPK bukan hal baru. Penyingkiran pegawai KPK yang ditarget, kata dia, bisa jadi merupakan tahap akhir untuk mematikan perjuangan pemberantasan korupsi.
Struktur Skrip	What	Novel Baswedan melakukan pengaduan terkait dugaan pelanggaran HAM pada asesmen TWK.
	Where	Kantor Komnas HAM.
	When	25 Mei 2021
	Who	Novel Baswedan (Penyidik KPK) dan Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK).
	Why	Novel Baswedan meyakini adanya agenda menyingkirkan pegawai KPK yang berkualitas.

	How	Menurut Novel, jumlah pegawai yang dipecat berubah dari 75 menjadi 51 menggambarkan bahwa oknum pimpinan KPK tetap melakukan rencana awal untuk menyingkirkan pegawai KPK yang telah ditarget melalui TWK. Sekalipun bertentangan dengan norma hukum dan arahan Jokowi.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat.	<p>Koherensi Kausalitas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para pegawai tetap semangat karena tidak semua perjuangan membuahkan hasil. <p>Koherensi Kontras</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tetap melakukan rencana awal untuk menyingkirkan pegawai KPK melalui TWK, sekalipun bertentangan dengan norma hukum dan arahan Presiden. - Meski ada agenda untuk menyingkirkan pegawai KPK berkualitas. <p>Koherensi Aditif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Norma hukum dan arahan Presiden Jokowi <p>Koherensi Kronologis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengatakan 51 pegawai KPK dinyatakan tidak bisa bergabung lagi dengan komisi antirasuah alias dipecat. <p>Koherensi Perurutan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oknum pimpinan KPK tetap melakukan rencana awal untuk menyingkirkan

		pegawai KPK melalui TWK.
Struktur Retoris	Kata	<ul style="list-style-type: none"> - Oknum - Ditarget - Mematikan - Antirasuah
	Idiom	Tidak ada dalam teks berita.
	Gambar/foto	Penyidik Senior KPK Novel Baswedan menyapa wartawan saat tiba di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin 24 Mei 2021. Perwakilan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) didampingi beberapa lembaga hukum melakukan pengaduan terkait dugaan pelanggaran HAM pada asesmen TWK. TEMPO/Muhammad Hidayat.
	Grafik	Tidak ada dalam teks berita.

Analisis

a. Struktur Sintaksis

Headline “51 Pegawai KPK Mau Dipecat, Novel Baswedan: Kami Berupaya Hingga Batas Akhir” dikutip dari pernyataan Novel Baswedan tentang usahanya bersama pegawai KPK yang lain sekaligus mewakili harapan masyarakat Indonesia dalam memberantas korupsi. *Headline* tersebut termasuk jenis *Quotation headline*, judul jenis ini mampu menarik perhatian pembaca karena menggunakan kutipan dari tokoh ternama.

Pada bagian *lead*, reporter menjelaskan penilaian Novel terhadap TWK sebagai alat untuk menyingkirkan pegawai yang ditarget. Bisa dibilang *lead* berita kurang sesuai dengan *headline*. Sebab, pada *headline* tertulis bahwa Novel akan berupaya hingga akhir. Sedangkan *lead* menyampaikan penilaian Novel terhadap perubahan jumlah pegawai yang dipecat.

Latar informasi dapat ditemui pada paragraf pertama. Latar informasi berita muncul karena menurut Novel, jumlah pegawai yang dipecat berubah dari sebelumnya 75 menjadi 51 membuktikan bahwa TWK memang dijadikan alat untuk menyingkirkan pegawai yang sudah ditarget oleh oknum pimpinan KPK.

Pada paragraf penutup, reporter kembali menuliskan pernyataan Novel bahwa upaya pelemahan KPK ini bukan hal yang baru. Bagian ini mengingatkan kita sejak awal dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Megawati hingga Presiden Jokowi, KPK menghadapi begitu banyak upaya pelemahan. Beberapa diantaranya seperti kriminalisasi pimpinan KPK, DPR meminta KPK untuk cuti penyidikan, Cicak vs Buaya, kekerasan terhadap penyidik, dan revisi UU KPK.

b. Struktur Skrip

Berita “51 Pegawai KPK Mau Dipecat, Novel Baswedan: Kami Berupaya Hingga Batas Akhir” sudah memenuhi unsur 5W+1H. Reporter banyak memaparkan unsur *how*, bagaimana oknum pimpinan KPK menggunakan TWK untuk menjalankan rencananya memberhentikan pegawai sekalipun ini bertentangan dengan norma hukum dan arahan Presiden Jokowi.

c. Struktur Tematik

Struktur Tematik berita “51 Pegawai KPK Mau Dipecat, Novel Baswedan: Kami Berupaya Hingga Batas Akhir” memiliki lima jenis koherensi yaitu Koherensi Kausal, Koherensi Kontras, Koherensi Aditif, Koherensi Kronologis, dan Koherensi Perurutan.

Reporter banyak memunculkan Koherensi Kontras terkait tindakan oknum pimpinan KPK yang berlawanan dengan arahan Presiden Jokowi.

d. Struktur Retoris

Dalam teks berita “51 Pegawai KPK Mau Dipecat, Novel Baswedan: Kami Berupaya Hingga Batas Akhir”, reporter menggunakan kata “ditarget” dan “mematikan” untuk menggambarkan TWK sebagai alat yang digunakan menjalankan rencana oknum pimpinan KPK terhadap targetnya.

Upaya yang dilakukan Novel dan kawan-kawan didukung dengan fotonya saat menyapa wartawan di Kantor Komnas HAM. Ditinjau dari fotografi jurnalistik, tidak ada objek dalam foto yang menggambarkan bahwa itu adalah gedung Kantor Komnas HAM, misalnya lambang Komnas HAM. Dalam foto hanya terdapat Novel Baswedan melambai ke wartawan terlihat dari pantulan cermin di belakangnya.

4. Analisis Berita

Judul : 51 Pegawai Dipecat, Moeldoko: Sudah Final, Kita Beri Kepercayaan Penuh KPK



Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko menggelar konferensi pers di rumahnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 3 Februari 2021. Moeldoko membantah tuduhan dirinya hendak mengambil alih Partai Demokrat. TEMPO/Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta masyarakat menghentikan perdebatan soal tes wawasan kebangsaan (TWK) yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Menurut Moeldoko, hasil tes sudah final dan selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada KPK. Dalam keputusan terakhir KPK dan BKN akan memecat 51 pegawai KPK dengan alasan sudah tidak bisa dibina.

"Sebaiknya kita sudah energi negatif dan praduga yang tidak konstruktif terhadap KPK. Perlu sikap bijak dari semua pihak untuk menyikapi situasi ini," ujar Moeldoko lewat keterangan video, Rabu, 26 Mei 2021.

"Kita tahu bahwa ini sudah final. KPK harus terus diperkuat oleh kita semua. Kita beri kepercayaan penuh kepada KPK untuk membenahi dan memperkuat diri,

bekerja untuk menindak koruptor secara tidak pandang bulu. Itu penting," lanjut Moeldoko.

Menurut Moeldoko, di lembaga lain juga banyak pegawai yang tak lolos TWK. "Soal tidak lolos uji TWK sebenarnya tidak hanya di KPK, tetapi juga di lembaga-lembaga lain pernah terjadi seperti itu kondisinya. Bahkan di BPIP ada begitu tes TWK mereka ternyata tidak lolos, kenapa itu tidak ribut? Kenapa yang di KPK begitu diributkan?" ujarnya.

Moeldoko meminta KPK menyiapkan skenario perbaikan melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan bagi mereka yang dinyatakan tidak lolos TWK.

Atas polemik yang terjadi, Presiden Jokowi menyampaikan agar hasil tes wawasan itu tak menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai KPK. "Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan, dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi," ujar Jokowi, Senin, 17 Mei 2021.

Belakangan, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata mengatakan 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK dinyatakan tidak bisa bergabung lagi dengan komisi antirasuah alias dipecat. Dia mengatakan berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh para penguji, mereka sudah tidak bisa lagi dibina. "Warnanya bilang sudah merah dan tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan," kata Alex di Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jakarta Timur, Selasa, 25 Mei 2021.

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	<i>Headline</i>	51 Pegawai Dipecat, Moeldoko: Sudah Final, Kita Beri Kepercayaan Penuh KPK
	<i>Lead</i>	Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta masyarakat menghentikan perdebatan soal tes wawasan kebangsaan (TWK) yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Menurut Moeldoko, hasil tes sudah final dan selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada KPK. Dalam keputusan terakhir KPK dan BKN akan memecat 51 pegawai KPK dengan alasan sudah tidak bisa dibina.
	Latar Informasi	Moeldoko meminta KPK menyiapkan skenario perbaikan melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan bagi mereka yang dinyatakan tidak lolos TWK.
	Kutipan Sumber	Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) <ul style="list-style-type: none"> - “Sebaiknya kita sudah energi negatif dan praduga yang tidak konstruktif terhadap KPK. Perlu sikap bijak dari semua pihak untuk menyikapi situasi ini.” - “Kita tahu bahwa ini sudah final. KPK harus terus diperkuat oleh kita semua. Kita beri kepercayaan penuh kepada KPK untuk membenahi dan memperkuat diri, bekerja untuk menindak koruptor secara tidak pandang bulu. Itu penting.”

		<ul style="list-style-type: none"> - “Soal tidak lolos uji TWK sebenarnya tidak hanya di KPK, tetapi juga di lembaga-lembaga lain pernah terjadi seperti itu kondisinya. Bahkan di BPIP ada begitu tes TWK mereka ternyata tidak lolos, kenapa itu tidak ribut? Kenapa yang di KPK begitu diributkan?” <p>Presiden Jokowi</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan, dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi.” <p>Alexander Marwata</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Warnanya bilang sudah merah dan tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan.”
	Pernyataan	<ul style="list-style-type: none"> - Moeldoko meminta masyarakat menghentikan perdebatan soal tes wawasan kebangsaan (TWK) yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN. - Menurut Moeldoko, hasil tes sudah final dan selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada KPK. - Menurut Moeldoko, di lembaga lain juga

		<p>banyak pegawai yang tak lolos TWK.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Moeldoko meminta KPK menyiapkan skenario perbaikan melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan bagi mereka yang dinyatakan tidak lolos TWK. - Presiden Jokowi menyampaikan agar hasil tes wawasan itu tak menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai KPK. - Alexander Marwata mengatakan 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK dinyatakan tidak bisa bergabung lagi dengan komisi antirasuah alias dipecat. - Dia mengatakan berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh para penguji, mereka sudah tidak bisa lagi dibina.
	Penutup	<p>Belakangan, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata mengatakan 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK dinyatakan tidak bisa bergabung lagi dengan komisi antirasuah alias dipecat. Dia mengatakan berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh para penguji, mereka sudah tidak bisa lagi dibina. “Warnanya bilang sudah merah dan tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan,” kata Alex di Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jakarta Timur, Selasa 25 Mei 2021.</p>
Struktur Skrip	What	<p>Menurut Moeldoko hasil TWK sudah final dan tidak perlu diributkan.</p>

	Where	Tidak ada dalam teks berita.
	When	26 Mei 2021
	Who	Moeldoko, Presiden Jokowi, dan Alexander Marwata
	Why	Di lembaga lain juga banyak pegawai yang tak lolos TWK.
	How	KPK harus terus diperkuat oleh kita semua. Beri kepercayaan penuh kepada KPK untuk membenahi dan memperkuat diri, bekerja untuk menindak koruptor secara tidak pandang bulu.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat.	<p>Koherensi Kontras</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak lolos uji TWK sebenarnya tidak hanya di KPK, tetapi juga di lembaga-lembaga lain. <p>Koherensi Aditif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam keputusan terakhir KPK dan BKN akan memecat 51 pegawai KPK <p>Koherensi Kronologis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menurut Moeldoko, hasil tes sudah final dan selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada KPK. - KPK dan BKN akan memecat 51 pegawai KPK dengan alasan sudah tidak bisa dibina. - Belakangan, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata mengatakan 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK dinyatakan

		<p>tidak bisa bergabung lagi dengan komisi antirasuah alias dipecat.</p> <p>Koherensi Perurutan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Moeldoko meminta KPK menyiapkan skenario perbaikan melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan bagi mereka yang dinyatakan tidak lolos TWK.
Struktur Retoris	Kata	<ul style="list-style-type: none"> - Final - Energi negatif - Praduga - Tidak Konstruktif
	Idiom	Tidak pandang bulu.
	Gambar/foto	Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko menggelar konferensi pers di rumahnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 3 Februari 2021. Moeldoko membantah tuduhan dirinya hendak mengambil alih Partai Demokrat. TEMPO/Putri.
	Grafik	Tidak ada dalam teks berita.

Analisis

a. Struktur Sintaksis

Headline “51 Pegawai Dipecat, Moeldoko: Sudah Final, Kita Beri Kepercayaan Penuh KPK” diambil dari kutipan Moeldoko pada paragraf ketiga dalam hal mempercayakan keputusan yang dikeluarkan KPK untuk terus membenahi dan memperkuat diri menindak koruptor. Jika diperhatikan, pola penulisan *headline* ini mirip dengan berita sebelumnya yaitu “51 Pegawai KPK Mau Dipecat, Novel Baswedan: Kami Berupaya Hingga Batas Akhir”, diawali dengan keterangan jumlah pegawai yang akan dipecat kemudian kutipan dari

narasumber. Berita tersebut juga terbit pada tanggal yang sama, hanya berbeda jam saja.

Pada paragraf *lead*, reporter menjelaskan himbauan yang disampaikan Moeldoko kepada masyarakat untuk menghentikan perdebatan soal TWK dan menyerahkan hasil keputusan kepada KPK. *Lead* ini merupakan jenis *lead* ringkasan, karena seluruh isi berita sudah terangkum dalam paragraf pertama. Kelemahannya, pembaca bisa saja tidak melanjutkan membaca hingga akhir karena merasa sudah menemukan informasi pentingnya.

Latar informasi dalam berita muncul karena Moeldoko meminta masyarakat untuk menghentikan perdebatan soal TWK. Karena, pelaksanaan TWK juga ada di lembaga lain dan ada pegawai yang tidak lulus, jadi tidak perlu diributkan. Kemudian, reporter menulis permintaan Moeldoko kepada KPK untuk menyiapkan pendidikan kedinasan.

Di bagian paragraf penutup, terdapat pernyataan dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Alexander Marwata terkait 51 pegawai yang sudah tidak bisa dibina lagi. Pernyataan ini juga sempat dimuat dalam berita sebelumnya. Dua paragraf terakhir ini menarik perhatian peneliti. Sebab, kalau diperhatikan, pernyataan Moeldoko dan Alexander Marwata dalam berita ini mengabaikan arahan Presiden. Dalam paragraf sebelumnya, reporter memuat sikap Jokowi yang tidak setuju jika TWK dijadikan alasan untuk menghentikan pegawai KPK. Bagian ini juga sudah terbit dalam berita sebelumnya, tepatnya pada tanggal 17 Mei 2021.

b. Struktur Skrip

Berita ini belum memenuhi unsur 5W+1H karena tidak ada unsur *where* dalam proses liputan. Berita ditulis berdasarkan keterangan yang disampaikan Moeldoko lewat keterangan video.

Reporter banyak memunculkan unsur *why*, sesuai yang dijelaskan Moeldoko kepada masyarakat mengapa persoalan tidak lulus TWK ini tidak perlu diributkan karena juga terjadi di lembaga lain.

c. Struktur Tematik

Berita “51 Pegawai Dipecat, Moeldoko: Sudah Final, Kita Beri Kepercayaan Penuh KPK” memiliki empat jenis koherensi yakni Koherensi Kontras, Koherensi Aditif, Koherensi Kronologis, dan Koherensi Perurutan.

Penulis banyak mengusung Koherensi Kronologis, mulai dari dikeluarkannya hasil TWK hingga keputusan yang dikeluarkan KPK dan BKN sebagai tindak lanjut.

d. Struktur Retoris

Reporter menggunakan kata “final” dalam berita untuk memberi penekanan terhadap keputusan yang dikeluarkan KPK benar-benar keputusan akhir yang tidak akan berubah dan harus diterima.

Lagi-lagi, reporter Tempo menggunakan foto yang tidak sesuai tanggal pengambilannya dengan tanggal penyampaian pernyataan oleh narasumber di dalam berita. Berita ini memang menggunakan foto Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan RI. Namun, foto tersebut diambil pada tanggal 3 Februari 2021 dalam konferensi pers perihal tuduhan kepadanya terkait kudeta Partai Demokrat. Sedangkan pernyataan yang ia sampaikan di dalam berita pada tanggal 26 Mei 2021. Sebagai pembaca berita yang kritis, penggunaan foto yang tidak sesuai dengan isi dapat menimbulkan keraguan akan kebenaran berita. Hal ini juga termasuk fatal karena menyangkut pernyataan dari tokoh ternama, dikhawatirkan dapat menyebabkan disinformasi.

5. Analisis Berita

Judul : Pimpinan KPK: Kami Sayang pada 75 Pegawai



Ketua KPK Firli Bahuri (ketiga kiri), Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (ketiga kanan), Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (kedua kiri), Nawawi Pomolango (kedua kanan), Nurul Ghufron (kiri), dan Alexander Marwarta (kanan) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Maret 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Ghufron mengatakan sayang pada 75 pegawai yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan. Dia mengatakan sebenarnya berharap semua pegawai KPK bisa beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara.

Namun, dia mengatakan urusan tes bukan urusan personal. Sehingga, kata dia, mereka yang tidak memenuhi syarat tetap tidak bisa diangkat menjadi ASN.

“Ini bukan urusan personal, bukan hanya sayang, tapi demi lembaga KPK kami berharap semuanya bisa masuk. Tapi karena perbedaan sistem itu kami tidak bisa memenuhi,” kata dia di kantornya, Jakarta, Kamis, 27 Mei 2021.

Ghufron mengatakan telah mengikuti arahan Presiden Joko Widodo agar hasil Tes Wawasan Kebangsaan tidak dijadikan satu-satunya dasar untuk memecat pegawai.

Mengikuti arahan itu, kata dia, pihaknya bersama Badan Kepegawaian Negara dan sejumlah kementerian mengadakan rapat pada 25 Mei 2021.

Rapat itu, kata dia, digelar untuk mereview ulang hasil TWK yang membuat 75 pegawai dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dia mengatakan dalam rapat itu pimpinan telah memperjuangkan agar 75 pegawai bisa menjadi ASN. Tetapi setelah hasil tes dibuka, kata dia, pegawai KPK dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu hijau, kuning dan merah. Hijau dan kuning artinya bisa langsung diangkat.

Sementara, pegawai KPK yang berwarna merah ada 75 orang. Ghufron mengatakan supaya sebagian orang itu bisa diangkat maka pihaknya menghapus satu indikator penilaian. Maka munculah hasil bahwa 24 orang dari 75 itu masih bisa diangkat dengan syarat mengikuti pembinaan. Sementara, 51 orang dianggap tidak bisa dibina. “Kami tegaskan, kami bukan hanya memperjuangkan, tapi kami menyayangi mereka semua,” kata dia.

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	<i>Headline</i>	Pimpinan KPK: Kami Sayang pada 75 Pegawai
	<i>Lead</i>	Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Ghufon mengatakan sayang pada 75 pegawai yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan. Dia mengatakan sebenarnya berharap semua pegawai KPK bisa beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara.
	Latar Informasi	BKN dan sejumlah kementerian mengadakan rapat untuk mereview hasil TWK.
	Kutipan Sumber	Nurul Ghufon (Wakil Ketua KPK) <ul style="list-style-type: none"> - “Ini bukan urusan personal, bukan hanya sayang, tapi demi lembaga KPK kami berharap semuanya bisa masuk. Tapi karena perbedaan sistem itu kami tidak bisa memenuhi.” - “Kami tegaskan, kami bukan hanya memperjuangkan, tapi kami menyayangi mereka semua.”
	Pernyataan	<ul style="list-style-type: none"> - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Ghufon mengatakan sayang pada 75 pegawai yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan. - Dia mengatakan sebenarnya berharap semua pegawai KPK bisa beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara. - Namun, dia mengatakan urusan tes bukan urusan personal. - Sehingga, kata dia, mereka yang tidak

		<p>memenuhi syarat tetap tidak bisa diangkat menjadi ASN.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ghufron mengatakan telah mengikuti arahan Presiden Joko Widodo agar hasil Tes Wawasan Kebangsaan tidak dijadikan satu-satunya dasar untuk memecat pegawai. - Mengikuti arahan itu, kata dia, pihaknya bersama Badan Kepegawaian Negara dan sejumlah kementerian mengadakan rapat pada 25 Mei 2021. - Rapat itu, kata dia, digelar untuk mereview ulang hasil TWK yang membuat 75 pegawai dinyatakan tidak memenuhi syarat. - Dia mengatakan dalam rapat itu pimpinan telah memperjuangkan agar 75 pegawai bisa menjadi ASN. - Tetapi setelah hasil tes dibuka, kata dia, pegawai, KPK dibagi menjadi tiga kelompok. - Ghufron mengatakan supaya sebagian orang itu bisa diangkat maka pihaknya menghapus satu indikator penilaian.
	Penutup	<p>Sementara, pegawai KPK yang berwarna merah ada 75 orang. Ghufron mengatakan supaya sebagian orang itu bisa diangkat maka pihaknya menghapus satu indikator penilaian. Maka munculah hasil 24 orang dari 75 itu masih bisa diangkat dengan syarat mengikuti pembinaan. Sementara, 51 orang dianggap tidak bisa dibina.</p>

		“Kami tegaskan, kami bukan hanya memperjuangkan, tapi kami menyayangi mereka semua,” kata dia.
Struktur Skrip	What	Pimpinan KPK sebenarnya menyayangi pegawai KPK.
	Where	Kantor KPK
	When	27 Mei 2021
	Who	Nurul Ghufron
	Why	Pimpinan KPK berharap semua pegawai bisa menjadi ASN.
	How	Dalam rapat pada 25 Mei 2021, pimpinan KPK telah memperjuangkan agar 75 pegawai bisa menjadi ASN.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat.	<p>Koherensi Kausalitas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sehingga, kata dia, mereka yang tidak memenuhi syarat tetap tidak bisa diangkat menjadi ASN. <p>Koherensi Kontras</p> <ul style="list-style-type: none"> - Namun, dia mengatakan urusan tes bukan urusan personal. - Tetapi setelah hasil tes dibuka, kata dia, pegawai KPK dibagi menjadi tiga kelompok <p>Koherensi Aditif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pihaknya bersama Badan Kepegawaian Negara dan sejumlah kementerian - Hijau dan kuning artinya bisa langsung diangkat.

		<p>Koherensi Temporal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengadakan rapat pada 25 Mei 2021. <p>Koherensi Kronologis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tetapi setelah hasil tes dibuka, kata dia, pegawai KPK dibagi menjadi tiga kelompok - Ghufron mengatakan telah mengikuti arahan Presiden Joko Widodo <p>Koherensi Perurutan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti arahan itu, kata dia, pihaknya bersama Badan Kepegawaian Negara dan sejumlah kementerian mengadakan rapat pada 25 Mei 2021.
Struktur Retoris	Kata	<ul style="list-style-type: none"> - Sayang - Personal - Mereview ulang
	Idiom	Tidak ada dalam teks berita.
	Gambar/foto	Ketua KPK Firli Bahuri (ketiga kiri), Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (ketiga kanan), Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (kedua kiri), Nawawi Pomolango (kedua kanan), Nurul Ghufron (kiri), dan Alexander Marwata (kanan) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Maret 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis.
	Grafik	Tidak ada dalam teks berita.

Analisis

a. Struktur Sintaksis

Headline “Pimpinan KPK: Kami Sayang pada 75 Pegawai” dikutip dari ungkapan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, pada paragraf ketiga bahwa para pimpinan sebenarnya menyayangi dan berharap semua pegawai bisa diangkat menjadi ASN. Ini termasuk jenis *Quotation lead*, menggunakan kutipan dari tokoh penting pada judul. Isi headline cukup jelas dan singkat. Menggunakan kutipan tokoh pada judul mampu menarik perhatian pembaca karena dapat menjawab rasa penasaran. Rasa penasaran yang dimaksud ialah pertanyaan “Bagaimana sebenarnya perasaan pimpinan KPK terhadap pegawainya yang tidak lulus?”. Karena sebelumnya, belum ada berita tentang tanggapan dari pihak KPK terhadap pegawai yang tidak lulus.

Kemudian pada paragraf pertama (*lead*), reporter belum menjelaskan lebih rinci bagaimana yang dimaksud rasa sayang kepada pegawai sehingga pembaca perlu melanjutkan hingga akhir paragraf untuk memahami apa saja upaya yang telah dilakukan pimpinan KPK untuk menyelamatkan pegawainya.

Latar informasi pada paragraf keempat disebutkan bahwa pada tanggal 25 Mei 2021, BKN dan sejumlah kementerian mengadakan rapat untuk *mereview* ulang hasil TWK. Rapat inilah yang menjadi latar informasi munculnya berita.

Paragraf penutup, reporter menuliskan lebih rinci hal yang dibahas dalam rapat tersebut sebagaimana yang disampaikan Nurul Ghufron. Hasil TWK menunjukkan dari 75 pegawai yang mendapat nilai merah, 24 diantaranya masih bisa diangkat dengan syarat mengikuti pembinaan. Sedangkan 51 sisanya tidak bisa lagi dibina. Sampai di sini, belum ada berita mengenai pemecatan 51 pegawai tersebut. Status mereka masih “tidak bisa lagi dibina”.

b. Struktur Skrip

Berita “Pimpinan KPK: Kami Sayang pada 75 Pegawai” sudah memenuhi unsur 5W+1H. Reporter banyak mengungkap unsur *how*. Hal ini bisa dilihat pada paragraf keempat sampai penutup dipenuhi dengan penjelasan rinci apa saja yang sudah dilakukan pimpinan KPK dalam rapat untuk memperjuangkan pegawai yang mereka sayangi.

c. Struktur Tematik

Ditinjau dari Struktur Tematik, berita ini memiliki enam jenis koherensi. Yaitu Koherensi Kausal, Koherensi Kontras, Koherensi Aditif, Koherensi Temporal, Koherensi Kronologis, dan Koherensi Perurutan.

Koherensi Aditif dan Kronologis paling banyak muncul karena memang sebagian besar berita menjelaskan apa saja yang telah diusahakan oleh pimpinan KPK untuk mengangkat pegawainya.

d. Struktur Retoris

Kata “sayang” dan “personal” digunakan untuk menggambarkan bagaimana sebenarnya perasaan pimpinan KPK terhadap pegawai yang tak lulus. Tapi memang sesuai sistem dan aturan yang berlaku, 51 pegawai tetap dianggap tidak bisa dibina lagi.

Berita didukung dengan foto enam pimpinan KPK mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI. Tapi foto tersebut diambil pada 10 Maret 2021. Tidak sesuai dengan tanggal Nurul Ghufron menyampaikan tanggapannya di dalam berita.

C. Hasil Pembingkai Berita

Polemik pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan sebagai syarat alih status pegawai masih terus bergulir. Tempo memaknai TWK sebagai suatu topik yang kontroversial. Dalam membuat berita, nilai berita menjadi salah satu kriteria yang sangat diperlukan oleh reporter untuk dapat memutuskan fakta yang akan diangkat. Nilai berita tersebut dinamakan dengan konflik. Tempo menyajikan pendapat dari pihak-pihak yang setuju dan tidak setuju dalam berita yang terbit selama dua pekan terhitung sejak tanggal 11 Mei hingga 26 Juni 2021.

Mereka yang mendukung mengatakan pelaksanaan TWK merupakan upaya penguatan KPK dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tidak ada pelanggaran HAM karena ini dilakukan sesuai Revisi UU KPK Nomor 19 Tahun 2019. TWK juga dilaksanakan di lembaga lain dan tentunya ada pegawai yang tidak lulus, jadi tidak perlu diributkan.

Sedangkan menurut pegawai yang tidak lulus dan pegiat antikorupsi, pimpinan KPK menyelundupkan aturan soal TWK ke Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021. Aturan itu sebelumnya tidak pernah dibahas pada penyusunan draf. Daftar pertanyaan yang digunakan dalam ujian juga janggal. Kemudian, hasil tes terlihat seperti sudah menarget pegawai yang berintegritas dan sering menangani kasus korupsi skala besar.

Dari analisis Sintaksis bisa dilihat bagaimana reporter menyusun *frame* dalam berita yang ditulis. Contohnya pada *headline Jokowi Tak Setuju TWK Dijadikan Dasar Untuk Berhentikan 75 Pegawai KPK*. Pemakaian judul menggunakan kata “Tak Setuju” merepresentasikan sikap Presiden Jokowi terhadap polemik TWK. Kemudian, tiga *headline* menggunakan jenis judul kutipan, seperti *51 Pegawai KPK Mau Dipecat, Novel Baswedan: Kami Berupaya Hingga Batas Akhir, 51 Pegawai Dipecat, Moeldoko: Sudah Final, Kita Beri Kepercayaan Penuh KPK dan Pimpinan KPK: Kami Sayang pada 75 Pegawai*. Menggunakan judul kutipan dari tokoh publik dapat menarik perhatian pembaca.

Dua dari lima berita Tes Wawasan Kebangsaan pegawai KPK yang terbit di Tempo.co dalam periode 11 Mei hingga 26 Mei 2021, peneliti menemukan kelemahan berupa tidak adanya unsur *where* (dimana). Dua berita tersebut yakni *ICW Duga Ada Persekongkolan di Balik Asesmen TWK Pegawai KPK* dan *51 Pegawai Dipecat, Moeldoko: Sudah Final, Kita Beri Kepercayaan Penuh KPK*. Kedua berita ditulis berdasarkan pemaparan narasumber lewat konferensi pers daring.

Dari keseluruhan unsur berita 5W+1H, Tempo.co cenderung menonjolkan unsur *why* (mengapa). Akan timbul pertanyaan dari pembaca “Mengapa tes wawasan kebangsaan di KPK tidak perlu diributkan?”, “Mengapa 51 pegawai tidak bisa lagi dibina?”, “Mengapa ICW menduga pimpinan KPK bersekongkol?”, dan sebagainya. Kemudian reporter akan menjawab pertanyaan dari pembaca dalam teks berita. Melalui unsur *why*, reporter menyampaikan pendapat Novel Baswedan dan rekannya yang berbeda dengan pendapat pimpinan KPK. Begitu juga dengan pendapat pimpinan KPK yang bertolak belakang dengan arahan Presiden Jokowi. Melalui cara ini, Tempo.co ingin memperlihatkan pendapat mana yang lebih ditonjolkan.

Struktur Tematik memperlihatkan, Tempo.co banyak menggunakan Koherensi Kronologis untuk menjelaskan urutan peristiwa sejak dikeluarkannya hasil TWK sampai upaya yang dilakukan pimpinan KPK untuk menyelamatkan pegawainya.

Dilihat dari sisi Retoris, peneliti menemukan empat dari lima berita menggunakan foto yang tanggal diambilnya tidak sesuai dengan tanggal liputan atau pernyataan yang disampaikan narasumber dalam berita. Sebagai contoh dalam berita *51 Pegawai Dipecat, Moeldoko: Sudah Final, Kita Beri Kepercayaan Penuh KPK*. Reporter menggunakan foto Moeldoko pada tanggal 3 Februari 2021 saat beliau menghadiri konferensi pers terkait kudeta Partai Demokrat. Foto jurnalistik memang dapat berdiri sendiri dengan dilengkapi takarir, tetapi keberadaannya juga dapat memperkuat nilai aktualitas berita. Akan lebih baik menggunakan foto yang sesuai dengan isi berita agar pembaca tidak bingung dan mencegah terjadinya disinformasi.

Hasil analisis *framing* menggunakan model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki menunjukkan terdapat perbedaan Tempo.co dalam membingkai lima berita yang terbit pada periode 11 Mei hingga 26 Mei 2021. Peneliti mengelompokkan *frame* pemberitaan polemik TWK pegawai KPK menjadi dua *main frame* yaitu, pro TWK dan kontra TWK.

Pembingkaiian berita yang pro dalam arti menyetujui dan menerima hasil Tes Wawasan Kebangsaan terdapat pada berita *51 Pegawai Dipecat, Moeldoko: Sudah Final, Kita Beri Kepercayaan Penuh KPK dan Pimpinan KPK: Kami Sayang pada 75 Pegawai*. Dilihat dari jenis *headline*, keduanya menuliskan kutipan narasumber yang mendukung TWK pada judulnya.

Fakta-fakta yang dituliskan reporter dalam kedua berita yang pro terhadap TWK diantaranya, pimpinan KPK sebenarnya menyayangi dan berharap semua pegawai bisa beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara. “Ini bukan urusan personal, bukan hanya sayang, tapi demi lembaga KPK kami berharap semuanya bisa masuk. Tapi karena perbedaan sistem itu kami tidak bisa memenuhi,” kata Nurul Ghufron pada paragraf ketiga.

Pihaknya bersama sejumlah kementerian juga telah mengadakan rapat pada 25 Mei 2021 untuk *mereview* ulang hasil TWK. Rapat ini digelar sesuai arahan Presiden Jokowi untuk tidak menjadikan TWK sebagai dasar memberhentikan pegawai. Dalam rapat itu, pimpinan telah memperjuangkan agar 75 pegawai yang masuk kategori berwarna merah bisa menjadi ASN. Supaya sebagian pegawai dengan kategori merah bisa diangkat, satu indikator penilaian harus dihapus. Maka muncul hasil bahwa 24 diantaranya masih bisa diangkat dengan syarat mengikuti pembinaan. Sisanya 51 pegawai dianggap tidak bisa lagi dibina.

Sama halnya pada berita berikutnya, Moeldoko menghimbau masyarakat untuk menghentikan perdebatan soal tes wawasan kebangsaan yang diselenggarakan KPK. Menurutnya, TWK juga dilakukan di lembaga lain dan ada pegawai yang tidak lolos. “Soal tidak lolos uji TWK sebenarnya tidak hanya di KPK, tetapi juga di lembaga-lembaga lain pernah terjadi seperti itu kondisinya.

Bahkan di BPIP ada begitu tes TWK mereka ternyata tidak lolos, kenapa itu tidak ribut? Kenapa yang di KPK begitu diributkan?” ujar Moeldoko.

Namun, terdapat satu paragraf pada berita ini yang melemahkan pendapat Moeldoko perihal TWK. Pada paragraf keenam, reporter menambahkan pendapat lain yang disampaikan Presiden Jokowi perihal polemik TWK. Paragraf ini merupakan berita yang terbit pada tanggal 17 Mei 2021. Presiden Jokowi menyampaikan agar hasil tes wawasan itu tak menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai KPK. “Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan, dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi,” jelas Jokowi.

Bagian ini seperti melemahkan apa saja yang telah disampaikan oleh Moeldoko karena Presiden sendiri, yang notabene jabatannya lebih tinggi sudah menyatakan sikap tidak setuju atas TWK. Sehingga, apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK dan yang disampaikan oleh Moeldoko sudah bertolak belakang dengan pernyataan presiden. Presiden Jokowi juga sudah menyertakan alasan dan arahan selanjutnya untuk pegawai yang tidak lolos.

Keberagaman *angle* berita yang diterbitkan Tempo.co juga menghadirkan pembingkai yang kontra Tes Wawasan Kebangsaan. Berita yang kontra dengan TWK adalah *Jokowi Tak Setuju TWK Dijadikan Dasar Untuk Berhentikan 75 Pegawai KPK*, *ICW Duga Ada Persekongkolan di Balik Asesmen TWK Pegawai KPK*, dan *51 Pegawai KPK Mau Dipecat, Novel Baswedan: Kami Berupaya Hingga Batas Akhir*.

Dikatakan kontra karena berita mengambil sudut pandang dari pihak yang bertentangan dengan penyelenggaraan TWK disertai kutipan narasumber dan fakta pendukung yang dimuat reporter.

Dalam berita *ICW Duga Ada Persekongkolan di Balik Asesmen TWK Pegawai KPK*, reporter memuat dua poin yang memperkuat penolakan TWK. Pertama, reporter menuliskan keputusan KPK bertolak belakang dengan keinginan Presiden

Jokowi agar pegawai diberi peluang untuk memperbaiki. Bagian ini diambil dari berita yang terbit pada tanggal 17 Mei 2021 tentang sikap Jokowi yang tidak setuju atas TWK. Informasi tambahan ini juga muncul dalam berita yang menyampaikan pendapat Moeldoko soal TWK sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Hanya saja disini informasi tambahan tersebut fungsinya untuk memperkuat poin pertentangan (kontra) atas TWK.

Kedua, masih dalam berita yang sama, reporter menambahkan pemecatan pegawai KPK sendiri bertentangan dengan pernyataan Firli Bahuri bahwa tidak ada niat untuk memecat Novel Baswedan dan kawan-kawan. “Kami ingin pastikan sampai hari ini tidak pernah KPK memberhentikan, tidak pernah KPK memecat dan tidak pernah juga berpikir KPK untuk menghentikan dengan hormat maupun tidak hormat,” jelas Firli.

Sebagai tambahan, informasi terkini Ombudsman menemukan kejangalan dalam pelaksanaan TWK. Pegawai KPK melakukan “serangan balik” dengan menggugat keterbukaan informasi. Sedangkan KPK menuding Ombudsman melakukan maladministrasi dalam menyelidiki laporan TWK. Tempo.co masih terus memberitakan perkembangan polemik TWK yang belum usai.

Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese dalam bukunya (1996, p. 88) mengklasifikasikan lima level yang mempengaruhi isi pemberitaan media. Mulai dari lingkaran terkecil, pada level individu pelaku media, rutinitas media, organisasi media, ekstra media, dan ideologi. Melalui pemberitaan Tes Wawasan Kebangsaan pegawai KPK ini, level kelima menjadi faktor terbesar yang mempengaruhi pemberitaan.

Sebagai media pers yang namanya sudah dikenal publik, Tempo memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Pernyataan ini peneliti kutip dari filosofi yang ditulis Goenawan Mohamad dalam pengantar majalah Tempo edisi pertama pada tahun 1971 dan juga dimuat pada laman tentang Tempo Media Group.

“Nilai budaya Tempo adalah terpercaya, merdeka, dan profesional. Terpercaya didefinisikan sebagai menjunjung tinggi nilai kejujuran, integritas, dan

konsistensi. Merdeka adalah memberikan ruang untuk kebebasan, berpikir, dan berekspresi. Sedangkan profesional adalah memiliki kompetensi yang tinggi di bidangnya.”

Dalam mekanisme pembentukan beritanya, Tempo mengklaim independensinya tidak berpihak pada satu golongan. Tugasnya sebagai media pers bukan untuk menyebarkan prasangka, melainkan melenyapkannya.

Asas jurnalisme kami bukanlah jurnalisme yang memihak satu golongan. Kami percaya bahwa kebajikan, juga ketidakbajikan, tidak menjadi monopoli satu pihak. Kami percaya bahwa tugas pers bukanlah menyebarkan prasangka, justru melenyapkannya, bukan membenihkan kebencian, melainkan mengkomunikasikan saling pengertian. Jurnalisme majalah ini bukanlah jurnalisme untuk memaki atau mencibirkan bibir, juga tidak dimaksudkan untuk menjilat atau menghamba.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis peneliti terkait berita Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK dalam Tempo.co periode 11 Juni hingga 26 Juni 2021 menggunakan metode analisis *framing* dengan model yang dikembangkan oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki pada bab empat, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sintaksis (cara wartawan menyusun fakta), *headline*, *lead*, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan, dan penutup tiga dari lima berita yang terbit bertentangan terhadap hasil TWK yang dikeluarkan oleh KPK.
2. Skrip (cara wartawan mengisahkan berita), sudah memenuhi unsur 5W+1H dan cenderung menonjolkan unsur *why*.
3. Tematik (cara wartawan menulis fakta) memperlihatkan Tempo.co banyak menggunakan Koherensi Kronologis untuk menjelaskan urutan peristiwa sejak dikeluarkannya hasil TWK sampai upaya yang dilakukan pimpinan KPK untuk menyelamatkan pegawainya.
4. Retoris (cara wartawan menekankan fakta), empat dari lima berita menggunakan foto yang tanggal diambilnya tidak sesuai dengan tanggal liputan atau pernyataan yang disampaikan narasumber dalam berita.

B. Saran

1. Sebaiknya Tempo.co menulis berita sesuai unsur 5W+1H secara lengkap dan menggunakan foto sesuai tanggal agar berita yang diterbitkan lebih kredibel dan mencegah disinformasi.

2. Meskipun Tempo.co dinilai sebagai media besar yang cukup berimbang dalam pemberitaannya, sebagai pembaca hendaknya kita tetap kritis dan melakukan verifikasi dalam menerima berita.
3. Sebab, tidak ada media yang benar-benar menyajikan fakta apa adanya, berita pasti sudah dikemas sesuai ideologi dan kepentingan media.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyanto, Elvinaro & Q-Annes. (2007). Filsafat Ilmu Komunikasi. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Bungin, Burhan. (2008). Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat. Jakarta: Kencana.
- Cangara, Hafied. 2012. Pengantar Ilmu Komunikasi. Rajagrafindo Persada: Jakarta
- Effendy, Uchjana Onong. (2004). Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Eriyanto. (2015). Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.
- Kriyantono, Rachmat. (2008). Teknis Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana.
- Kusumaningrat, Hikmat. (2006). Jurnalistik Teori dan Praktek. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mondry. (2008). Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurudin. (2009). Jurnalisme Masa Kini. Jakarta: Raja Grafindo.
- Nurudin. (2013). Pengantar Komunikasi Massa. Rajagrafindo Persada: Depok.
- Rivers, William L. Dkk. 2003. Media Massa & Masyarakat Modern. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Roudhonah. (2019). Ilmu Komunikasi. Rajagrafindo Persada: Depok.
- Santana, Septiawan. (2005). Jurnalisme Kontemporer. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Sobur, Alex. (2001). Analisis Teks Media Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotika, dan Analisis “Framing”. Remaja Rosdakarya: Bandung.

Tamburaka, Apriadi. 2012. Agenda Setting Media Massa. Rajagrafindo Persada: Jakarta.

JURNAL DAN SKRIPSI

Ayu Pratiwi, Suci. (2020). *Analisis Framing Berita Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Presiden Jokowi Dalam Tempo.co Periode 14 April 26 April 2020*. Skripsi S1. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Fahmi. (2016). *Analisis Framing Pemberitaan Media Online Rakyat Merdeka dan CNN Indonesia Dalam Isu Penetapan 19 Pondok Pesantren Penyebar Paham Radikalisme Oleh BNPT*. Skripsi S1. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Fardiana. (2014). *Analisis Penyajian Foto Berita Pada Surat Kabar Harian Umum Rakyat Bengkulu*. Vol.1 (No. 1).

Fauzi, Hepi. (2019). *Analisis Framing Model Pan dan Kosicki Berita Kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2019 Pada Media Cetak Harian Duta Masyarakat Rentang Waktu 23 September-30 November 2018*. Skripsi S1. Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Hajerimin. (2017). *ANALISIS FRAMING MEDIA MASSA (Konstruksi Berita Politik Harian Amanah Tentang Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar Jelang Pilgub Sul-Sel 2018: Studi Analisis Framing Zongdang Pan dan Gerald M. Kosicki)*. Skripsi S1. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.

- Krisdinanto, Nanang. (2014). *Anomali dan Teori Hirarki Pengaruh Terhadap Isi Media*. Vol. 3 (No. 1).
- Pratama Putra, Vichar. (2016). *PEMBINGKAIAN BERITA MEDIA ONLINE (Analisis Framing Pemberitaan Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi atas Kritik Media Massa di Media online Sindonews.com Dan vivanews.co.id Edisi Agustus 2015)*. Skripsi S1. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Santoso, Puji. (2016). *Konstruksi Sosial Media Massa*. Vol. 1 (No. 1).
- Sari Harahap, Ratna. (2020). *Analisis Framing Pemberitaan Demonstrasi Mahasiswa Tentang Penolakan RUU KUHP Di Harian Waspada dan Analisa Medan Edisi September 2019*. Skripsi S1. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Suhaimah. (2019). *Analisis Framing Tribunnews.com Terhadap Berita Penangkapan Vanessa Angel Dalam Prostitusi Online Tahun 2019*. Skripsi S1. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Yolanda, Elvina. (2016). *Analisis Framing Berita Pembunuhan Wayan Mirna Salihin Pada Surat Kabar Harian Kompas Edisi Pra-rekonstruksi*. Skripsi S1. Jakarta: Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

INTERNET

- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021, 2 Juni). *Overview of KPK*. Dikutip dari <https://www.kpk.go.id/en/about-kpk/overview-of-kpk>
- Tempo Media Group. (2021, 2 Juni). *Tentang Kami*. Dikutip dari www.tempo.id/about.php.